

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 2

PENULIS :

Dwi Ekasari Harmadji

Safrizal

Wulandari Pryangan

Adhi Alfian

Yusni

Roy Budiharjo

Ismawati

Sarsiti

Rizky Maharani Rustam

Dewi Mustika Ratu



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 2

**Dwi Ekasari Harmadji
Safrizal
Wulandari Pryangan
Adhi Alfian
Yusni
Roy Budiharjo
Ismawati
Sarsiti
Rizky Maharani Rustam
Dewi Mustika Ratu**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 2

Penulis :

Dwi Ekasari Harmadji

Safrizal

Wulandari Pryangan

Adhi Alfian

Yusni

Roy Budiharjo

Ismawati

Sarsiti

Rizky Maharani Rustam

Dewi Mustika Ratu

ISBN : 978-623-125-312-5

Editor : Diana Purnama Sari., S.E. ME

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S. Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah

Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Akuntansi Sektor Publik 2 ini.

Buku Ini Membahas Pengantar Akuntansi Sektor Publik, Konsep, Karakteristik Dan Ruang Lingkup, Akuntansi Sektor Publik, Standar Akuntansi Sektor Publik, Siklus Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik, Analisis Investasi Publik, Pengukuran Kinerja Sektor Publik.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Transparansi dan Akuntabilitas.....	2
1.3 Standar Akuntansi.....	3
1.4 Siklus Anggaran Publik.....	4
1.5 Pembiayaan Sektor Publik.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16
BAB 2 KONSEP, KARAKTERISTIK DAN	
RUANG LINGKUP.....	21
2.1 Pendahuluan.....	21
2.2 Peran Penting Akuntansi Sektor Publik.....	21
2.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	22
2.4 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	30
BAB 3 URGENSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	31
3.1 Pendahuluan.....	31
3.2 Urgensi Akuntansi Sektor Publik.....	33
3.3.1 Kebijakan Akuntansi.....	33
3.3.2 Perencanaan Anggaran Sektor Publik.....	34
3.3.3 Kualitas Laporan Keuangan.....	36
3.3.4 Akuntabilitas	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39
BAB 4 STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	43
4.1 Pendahuluan.....	43
4.2 Karakteristik dan Lingkungan Akuntansi Sektor Publik.....	45
4.3 Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik.....	47
4.4 Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BAB 5 SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	57
5.1 Pendahuluan.....	57
5.2 Siklus Akuntansi Sektor Publik	58

5.2.1 Transaksi.....	60
5.2.2 Analisis Bukti Transaksi.....	61
5.2.3 Pencatatan data Transaksi atau menjurnal.....	61
5.2.4 Pengelompokkan dan pegihktisarkan data	62
5.2.5 Penerbitan laporan dan catatannya,	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
BAB 6 AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK.....	65
6.1 Pendahuluan.....	65
6.2 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik ..	66
6.3 Aktivitas Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	67
6.4 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	68
6.5 Pengendalian Manajemen Sektor Publik.....	71
6.6 Tujuan Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	73
6.7 Peranan Teknologi Dalam Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
BAB 7 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK.....	79
7.1 Pendahuluan.....	79
7.2 Konsep Dasar Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik.....	82
7.3 Tipe Pengendalian Manajemen	83
7.4 Struktur Pengendalian Manajemen.....	83
7.5 Proses Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik.....	84
7.5.1 Tahapan Proses Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik	84
7.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Siklus SPM.....	86
7.5.3 Manfaat Penerapan Siklus SPM yang Efektif:...	86
7.6 Tantangan dan Isu dalam Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik	86
7.7 Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
BAB 8 JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK	93
8.1 Pengertian Anggaran.....	93
8.2 Manfaat Anggaran	94
8.3 Fungsi anggaran	95

8.3.1 Alat perencanaan	95
8.3.2 Alat pengendalian	95
8.3.3 Alat kebijakan fiskal.....	96
8.3.4 Alat politik	96
8.3.5 Alat koordinasi dan komunikasi	96
8.3.6 Alat penilaian kinerja	96
8.3.7 Alat Motivasi.....	97
8.3.8. Alat menciptakan ruang publik.....	97
8.4 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik	97
8.4.1 Anggaran Operasional	97
8.4.2 Anggaran Modal	98
8.5 Siklus Anggaran Sektor Publik	102
8.5.1 Persiapan Anggaran.....	102
8.5.2 Ratifikasi Anggaran.....	102
8.5.3 Pelaksanaan Anggaran.....	103
8.5.4 Laporan dan Penilaian	103
8.6 Pendekatan Penyusunan Anggaran.....	103
8.6.1 Pendekatan dari atas ke bawah (<i>Top down approach</i>)	103
8.6.2 Pendekatan dari bawah ke atas (<i>Bottom up approach</i>).....	103
8.6.3 Kombinasi top down dan bottom up.....	104
8.6 Prinsip-prinsip anggaran Publik.....	104
8.7 Karakteristik anggaran sektor public.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
BAB 9 ANALISIS INVESTASI PUBLIK	109
9.1 Pendahuluan.....	109
9.2 Program Investasi Publik	110
9.3 Penentuan Kebutuhan Investasi Publik.....	111
9.3.1 Investasi Penggantian	112
9.3.2 Investasi Penambahan Kapasitas	112
9.3.3 Investasi Baru	113
9.4 Aspek Kelayakan Investasi.....	113
9.4.1 Aspek Teknik.....	113
9.4.2 Aspek Sosial dan Budaya	113
9.4.3 Aspek Ekonomi dan Finansial.....	114
9.4.4 Aspek Distribusi	114
9.5 Faktor Investasi Publik.....	114

9.5.1 Tingkat Diskonto yang Digunakan	116
9.5.2 Tingkat Inflasi	118
9.5.3 Risiko dan Ketidakpastian.....	118
9.5.4 Penjatahan Modal	118
9.6 Teknik Penilaian Investasi Publik	119
9.6.1 Identifikasi Kebutuhan Investasi yang Mungkin Dilakukan.....	120
9.6.2 Menentukan Semua Manfaat dan Biaya dari Proyek yang akan Dilaksanakan (<i>cost / benefit relationship</i>).....	120
9.6.3 Menghitung Manfaat dan Biaya dalam Rupiah	120
9.6.4 Memilih Proyek Yang Memiliki Manfaat Terbesar Dan Efektivitas Biaya Yang Tinggi	121
DAFTAR PUSTAKA.....	125
BAB 10 PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK.....	127
10.1 Pendahuluan	127
10.2 Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	128
10.3 Manfaat Pengukuran Kinerja.....	129
10.4 Elemen Pengukuran Kinerja	131
10.5 Konsep Value for Money	134
10.6 Kendala pengukuran kinerja	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	22
Tabel 2.2. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Privat.....	23
Tabel 4.1. Perbandingan Sektor Publik dan Privat.....	46
Tabel 7.1. Perbedaan SPM Sektor Publik dan Swasta.....	80
Tabel 10.1. Ilustrasi Input, Ouput dan Outcome pada layanan perpustakaan daerah.....	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik...	24
Gambar 4.1.	Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	49
Gambar 4.2.	Contoh Bentuk Neraca	52
Gambar 4.3.	Contoh Bentuk Laporan Kinerja Keuangan.....	53
Gambar 4.4.	Contoh Bentuk Laporan Perubahan Ekuitas	53
Gambar 4.5.	Contoh Bentuk Laporan Arus Kas.....	54
Gambar 4.6.	Contoh Bentuk Laporan Realisasi Anggaran.....	55
Gambar 5.1.	Siklus Akuntansi Sektor Publik.....	60
Gambar 6.1.	Proses Perencanaan Dan Pengendalian Manajerial	73

BAB 1

PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Dwi Ekasari Harmadji

1.1 Pendahuluan

Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang yang membahas prinsip, praktik, dan standar akuntansi yang diterapkan dalam entitas sektor publik seperti pemerintah, lembaga pemerintah, dan entitas nirlaba. Akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta karena tujuannya lebih terfokus pada penyediaan layanan publik dan pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat, bukan pada profitabilitas seperti pada perusahaan swasta. Beberapa konsep yang penting dalam akuntansi sektor publik meliputi sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Sebagai sektor yang melayani kepentingan publik, transparansi dalam pelaporan keuangan sangat penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai penggunaan dana publik. Akuntabilitas juga merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa entitas sektor publik bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang tepat (Putri and Maghfiroh, 2022) (Mardiasmo, 2018).
2. **Standar Akuntansi:** Ada standar akuntansi khusus yang diterapkan dalam sektor publik, seperti standar yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan regulasi akuntansi seperti IFRS (International Financial Reporting Standards) yang dikonversi menjadi standar yang sesuai dengan konteks sektor publik.
3. **Siklus Anggaran Publik:** Proses anggaran publik, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan, adalah bagian integral dari

akuntansi sektor publik (Yuesti, Dewi and Pramesti, 2020) (Mardiasmo, 2018).

4. **Pembiayaan Sektor Publik:** Penyusunan dan pengelolaan sumber daya keuangan sektor publik melalui pajak, pinjaman, dan sumber daya lainnya merupakan bagian penting dari akuntansi sektor publik (Kristiyani and Hamidah, 2020) (Mardiasmo, 2018).

Memahami prinsip-prinsip dasar ini penting bagi mereka yang terlibat dalam manajemen keuangan dan pelaporan keuangan di sektor publik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efektif.

1.2 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep kunci dalam akuntansi sektor publik yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan menjaga kepercayaan publik.

1. **Transparansi:** Ini mencakup ketersediaan informasi yang jelas, tepat waktu, dan mudah diakses mengenai kegiatan, keputusan, dan kondisi keuangan entitas sektor publik. Dalam konteks akuntansi sektor publik, transparansi melibatkan penyediaan laporan keuangan yang jelas dan terperinci, serta pengungkapan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan, seperti warga negara, pembayar pajak, dan lembaga pemerintah lainnya (Hartoto *et al.*, 2023).
2. **Akuntabilitas:** Ini mengacu pada kewajiban entitas sektor publik untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan keuangan mereka. Akuntabilitas menuntut bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan dana publik (Mardiasmo, 2006).

Dalam konteks akuntansi sektor publik, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bisa termasuk:

1. **Penerapan Standar Akuntansi:** Menggunakan standar akuntansi yang relevan dan terkini untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Hendrianto¹ and Indrawan, 2022) (Mardiasmo, 2018).
2. **Pengawasan dan Audit yang Ketat:** Melakukan audit secara teratur untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dilakukan dengan benar dan transparan (Sudrajat and Lasminto, 2022).
3. **Partisipasi Publik:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan melalui pertemuan publik, konsultasi, atau platform partisipatif lainnya.
4. **Pelaporan yang Jelas dan Terbuka:** Menyajikan informasi keuangan dan operasional secara jelas dan terbuka kepada publik melalui laporan tahunan, situs web, atau platform lainnya (Wijayanti and Setyawan, 2023).
5. **Pelatihan dan Pendidikan:** Memberikan pelatihan kepada staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik agar mereka memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi sektor publik.

Upaya yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik dapat membantu membangun kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta memastikan penggunaan dana publik yang lebih bertanggung jawab.

1.3 Standar Akuntansi

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang berlaku untuk entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia. Sementara itu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan untuk entitas dengan akuntabilitas publik, seperti lembaga pemerintah, termasuk kementerian, lembaga non-departemen, badan, dan unit organisasi lain yang terkait dengan pemerintahan. SAK

ETAP didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang digunakan secara umum di Indonesia untuk entitas bisnis, sedangkan SAP lebih menekankan pada kebutuhan dan karakteristik akuntansi sektor publik, seperti transparansi pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik (Bakar, 2023).

Selain SAP, ada juga Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (SAPBA) yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas informasi keuangan di sektor publik dengan menerapkan prinsip akrual dalam pelaporan keuangan. SAPBA diharapkan akan menggantikan SAP dalam jangka waktu tertentu.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (SAPBA) adalah kerangka kerja akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintahan untuk merekam, melaporkan, dan mengelola transaksi keuangan mereka berdasarkan prinsip akrual. SAPBA dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan dalam sektor publik. Dalam SAPBA, entitas pemerintahan diharapkan untuk mencatat transaksi keuangan tidak hanya pada saat uang diterima atau dibayarkan (basis kas), tetapi juga pada saat transaksi terjadi, seperti pendapatan diperoleh atau kewajiban ditanggung (basis akrual).

Konversi ke sistem SAPBA bisa menjadi proses yang kompleks karena mengharuskan pemerintah untuk mengubah praktik akuntansi mereka, memperbarui sistem informasi keuangan, dan melatih staf agar terbiasa dengan pendekatan baru yang berfokus pada akrual. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengelola keuangan mereka dengan cara yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan standar internasional untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan dan kinerja mereka.

1.4 Siklus Anggaran Publik

Siklus anggaran publik menggambarkan serangkaian langkah atau tahapan yang terjadi dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran oleh pemerintah atau

lembaga publik. Siklus ini biasanya terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Perencanaan Anggaran:

Tahap awal di mana prioritas, tujuan, dan kebutuhan pemerintah atau lembaga publik ditetapkan. Departemen atau unit-unit di dalamnya mengajukan permintaan anggaran berdasarkan kebutuhan mereka. Perencanaan anggaran dalam sektor publik adalah proses penting yang melibatkan penetapan dan alokasi sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pemerintah. Langkah-langkah umum dalam perencanaan anggaran sektor publik meliputi:

- a. **Identifikasi Kebutuhan:** Pemerintah menilai kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan program-program lainnya (Salsabila, 2023).
- b. **Pengumpulan Data:** Data ekonomi, proyeksi pertumbuhan, serta informasi tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat dikumpulkan untuk mendukung pengambilan keputusan (Rezeki, 2022).
- c. **Penetapan Tujuan dan Prioritas:** Pemerintah menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta menentukan prioritas dalam alokasi anggaran untuk memenuhi tujuan tersebut (Putra, 2021).
- d. **Penyusunan Anggaran:** Proses penyusunan anggaran dilakukan dengan menentukan seberapa besar alokasi dana yang akan dialokasikan ke setiap sektor atau program (Septiani, Defitri and Sukraini, 2022).
- e. **Pengajuan dan Penelaahan Anggaran:** Rencana anggaran diajukan kepada badan legislatif atau otoritas yang relevan untuk ditinjau, disetujui, atau dimodifikasi (Costari and Belinda, 2021).
- f. **Implementasi dan Pelaksanaan:** Setelah disetujui, anggaran diterapkan dan dana dialokasikan sesuai rencana untuk menjalankan program-program pemerintah (Bakar, 2023).
- g. **Pemantauan dan Evaluasi:** Pengawasan terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran

dijalankan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi dampak program dan kebijakan yang didanai oleh anggaran tersebut.

Selama proses ini, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat penting. Transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat, pemantauan yang cermat, serta keterlibatan publik yang efektif adalah kunci utama dalam perencanaan anggaran yang sukses di sektor publik.

2. Penyusunan Anggaran: Informasi dari perencanaan digunakan untuk menyusun rancangan anggaran. Pada tahap ini, alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan ditentukan. Penyusunan anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis sangat penting untuk mengelola sumber daya dengan baik demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa langkah yang bisa membantu dalam proses tersebut:

a. Perencanaan yang Komprehensif

Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan alokasikan sumber daya sesuai prioritas (Saskia, Amin and Junaidi, 2020).

Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak untuk memahami beragam perspektif dan kebutuhan yang harus dipenuhi (Saputri, 2023).

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Komunikasi yang Jelas: Sampaikan informasi secara terbuka kepada publik tentang alokasi anggaran dan penggunaannya (Primastiwi, Wardani and Kitna, 2020).

Pengawasan dan Evaluasi: Adakan mekanisme pengawasan untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

c. Efisiensi Pengeluaran

Pengurangan Pemborosan: Identifikasi area di mana pengeluaran tidak efisien dan cari cara untuk menguranginya.

Pengadaan yang Efisien: Manfaatkan teknologi dan proses yang lebih efisien dalam pengadaan barang/jasa (Putra, 2021).

Prioritaskan Keseimbangan Antara Penerimaan dan Pengeluaran

Diversifikasi Penerimaan: Cari sumber pendapatan yang beragam dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja (Kitna, et.al., 2020).

Pengendalian Pengeluaran: Tetapkan batas yang realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal untuk menghindari defisit yang berlebihan (Ega, 2022).

d. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

Sistem Informasi Keuangan yang Tepat: Gunakan sistem yang memungkinkan pencatatan yang akurat dan transparan mengenai pengeluaran dan penerimaan.

Adopsi Inovasi: Manfaatkan teknologi baru atau metode yang inovatif untuk mengoptimalkan efisiensi pengeluaran (Ega, 2022).

e. Responsif Terhadap Perubahan

Fleksibilitas Anggaran: Beradaptasi dengan perubahan situasi ekonomi atau kebutuhan masyarakat dengan melakukan penyesuaian anggaran jika diperlukan.

Evaluasi Reguler: Lakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa anggaran tetap relevan dengan tujuan jangka panjang (Paramitha, 2021).

Proses penyusunan anggaran yang baik memerlukan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan saat ini dan mengamankan keberlanjutan jangka panjang. Keberhasilan dalam mengelola anggaran sektor publik akan sangat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan oleh masyarakat.

3. Pengesahan Anggaran: Rancangan anggaran diajukan kepada badan legislatif atau otoritas yang bertanggung jawab untuk disetujui. Diskusi, perubahan, dan persetujuan terjadi di tingkat ini. Pengesahan anggaran sektor publik adalah proses di mana pemerintah atau lembaga otoritas yang relevan menyetujui rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan untuk suatu periode tertentu. Proses ini biasanya melibatkan pembahasan, perencanaan, dan penilaian terhadap pengeluaran yang diusulkan untuk berbagai program dan proyek yang akan didanai oleh pemerintah. Proses pengesahan anggaran ini sangat penting karena mengatur sumber daya keuangan yang akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan, layanan, dan proyek. Langkah-langkahnya dapat melibatkan banyak tahapan, seperti:

- a. Pembuatan Rencana Anggaran:** Departemen atau lembaga-lembaga yang relevan menyusun rencana anggaran yang mencakup proyeksi pengeluaran dan penerimaan yang diperkirakan terkait, termasuk pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan mungkin melibatkan konsultasi dengan para ahli atau lembaga keuangan.
- b. Perubahan dan Negosiasi:** Kemungkinan adanya perubahan pada rencana anggaran sebagai hasil dari diskusi, perundingan, dan negosiasi antara berbagai pihak terlibat.
- c. Pengesahan:** Setelah disetujui oleh otoritas yang berwenang, anggaran tersebut diresmikan dan diumumkan sebagai rencana keuangan resmi yang akan digunakan.
- d. Pelaksanaan dan Monitoring:** Setelah pengesahan, anggaran tersebut dilaksanakan, dan proses monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas penggunaan dana.

Pengesahan anggaran sering kali menjadi isu politik yang signifikan karena melibatkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang beragam di dalam masyarakat. Prosesnya juga

mencerminkan prioritas dan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lainnya.

- 4. Pelaksanaan Anggaran:** Setelah disetujui, anggaran mulai diterapkan. Dana dialokasikan untuk berbagai program dan proyek sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Pelaksanaan anggaran dalam sektor publik merujuk pada proses perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan dana oleh pemerintah atau entitas sektor publik lainnya untuk membiayai kegiatan dan program-program yang telah direncanakan. Ini melibatkan serangkaian langkah yang penting:

a. Perencanaan Anggaran

Penyusunan Rencana Anggaran: Menetapkan tujuan dan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan.

b. Penyusunan Anggaran

- 1) **Pengajuan Usulan Anggaran:** Berbagai departemen atau unit mengajukan proposal anggaran mereka.
- 2) **Evaluasi dan Penetapan Anggaran:** Pemeriksaan usulan untuk menetapkan anggaran akhir.

c. Pengelolaan Anggaran

- 1) **Pendanaan Kegiatan:** Pencairan dana untuk melaksanakan program dan proyek sesuai alokasi anggaran.
- 2) **Pemantauan Pengeluaran:** Memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana.

d. Pelaporan dan Evaluasi

- 1) **Pelaporan Keuangan:** Menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan dana secara transparan.
- 2) **Evaluasi Kinerja:** Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana terhadap tujuan yang ditetapkan. Dalam siklus anggaran akuntansi sektor publik, pelaporan dan evaluasi memiliki peran penting untuk memastikan transparansi,

akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif dari dana publik.

Pelaporan

- a. **Pelaporan Anggaran:** Tahap ini melibatkan penyusunan laporan anggaran yang mencatat rencana pengeluaran dan penerimaan untuk suatu periode tertentu.
- b. **Pelaporan Realisasi Anggaran:** Setelah periode tertentu berakhir, laporan realisasi anggaran disusun untuk membandingkan antara rencana dan realisasi pengeluaran serta penerimaan. Laporan ini mencakup informasi tentang belanja aktual, pendapatan aktual, dan perbedaan antara anggaran dan realisasi.

Evaluasi

- a. **Evaluasi Kinerja:** Proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Evaluasi kinerja dapat melibatkan analisis efisiensi, efektivitas, dan dampak dari penggunaan dana publik.
- b. **Pemantauan dan Analisis:** Melalui pemantauan yang teratur terhadap realisasi anggaran dan pencapaian tujuan, dilakukan analisis untuk mengevaluasi apakah ada perubahan strategi yang perlu dilakukan atau penyesuaian pada anggaran di masa mendatang.

Proses pelaporan dan evaluasi ini membantu pemerintah dan entitas sektor publik untuk:

- a. Memperoleh wawasan tentang bagaimana dana publik digunakan.
- b. Mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan realisasi anggaran.
- c. Menilai kinerja program atau proyek yang didanai oleh dana publik.
- d. Mengambil keputusan yang lebih baik untuk perencanaan anggaran di masa mendatang.

Kedua proses ini adalah bagian penting dari siklus anggaran dan membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

5. Audit

- **Audit Keuangan:**

Pemeriksaan independen terhadap penggunaan dana untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Audit keuangan sektor publik adalah proses pemeriksaan independen yang dilakukan terhadap laporan keuangan entitas sektor publik, seperti pemerintah, lembaga-lembaga publik, atau badan usaha milik negara. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi keandalan, akurasi, dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut. Audit keuangan sektor publik biasanya dilakukan oleh lembaga atau profesional yang independen dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan audit. Auditor akan meninjau transaksi keuangan, prosedur akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hasil dari audit keuangan sektor publik dapat memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan, seperti publik, pemerintah, investor, dan lainnya, mengenai transparansi, integritas, dan efisiensi pengelolaan keuangan entitas yang diperiksa. Selain itu, audit keuangan juga dapat membantu dalam menemukan potensi penyalahgunaan keuangan, ketidaktepatan pengelolaan dana publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

6. Prinsip Utama dalam Pelaksanaan Anggaran Sektor Publik:

- a. **Keterbukaan dan Akuntabilitas:** Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.

- b. Efisiensi dan Efektivitas:** Penggunaan dana dengan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Pengawasan yang Ketat:** Memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan yang Mungkin Dihadapi:

- a. Perubahan Prioritas:** Perubahan kebutuhan dan prioritas yang mempengaruhi alokasi dana.
- b. Pengendalian Pengeluaran:** Memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Pengelolaan Risiko:** Mengelola risiko terkait dengan perubahan ekonomi atau kebijakan.

Pelaksanaan anggaran sektor publik memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan cermat dan transparan.

- 7. Pengawasan dan Pengendalian:** Proses ini melibatkan pemantauan pelaksanaan anggaran untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana. Jika terjadi perubahan situasi atau kebutuhan mendesak, penyesuaian anggaran bisa dilakukan.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, pengawasan (*supervision*) dan pengendalian (*control*) sangat penting untuk memastikan keandalan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Ini melibatkan beberapa praktik dan mekanisme untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian dalam akuntansi sektor publik:

Pengawasan (*Supervision*):

- a. Pemeriksaan Internal:** Proses yang dilakukan oleh unit internal untuk menilai dan memastikan keefektifan

kontrol internal, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta identifikasi risiko.

- b. Audit Eksternal:** Dilakukan oleh pihak independen untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi, keakuratan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap standar akuntansi yang berlaku.
- c. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan:** Memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam lingkup sektor publik.
- d. Transparansi dan Pelaporan:** Menjamin bahwa informasi keuangan dan operasional tersedia secara terbuka untuk publik agar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian (Control):

- a. Kontrol Internal:** Prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- b. Pengelolaan Risiko:** Identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan sektor publik.
- c. Pemisahan Tugas:** Mencegah terjadinya konflik kepentingan dengan memisahkan tugas-tugas penting dalam proses keuangan, seperti pembuatan, otorisasi, dan pemeriksaan transaksi.
- d. Teknologi Informasi:** Menggunakan sistem dan teknologi informasi yang memadai untuk memfasilitasi pencatatan, pelaporan, dan pengawasan transaksi keuangan.

Pengawasan dan pengendalian dalam akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan keuangan, dan memastikan penggunaan dana publik secara efisien dan efektif.

8. Pelaporan dan Evaluasi: Pemerintah atau lembaga publik melaporkan penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Siklus ini bersifat iteratif, yang berarti bahwa setelah tahap evaluasi, langkah-langkah perencanaan selanjutnya dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Ini memungkinkan pemerintah atau lembaga publik untuk memperbaiki kebijakan dan penggunaan anggaran di masa mendatang.

1.5 Pembiayaan Sektor Publik

Pembiayaan sektor publik merujuk pada sumber dana yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mendanai kegiatan, proyek, atau layanan yang mereka sediakan kepada masyarakat. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari beberapa sumber, termasuk pendapatan pajak, pinjaman dari lembaga keuangan, penerbitan obligasi, dan pendapatan dari aset atau investasi yang dimiliki oleh pemerintah. Tujuan utama dari pembiayaan sektor publik adalah untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan untuk infrastruktur, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program pemerintah lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengeluaran ini sering kali melebihi pendapatan langsung yang diperoleh oleh pemerintah, sehingga diperlukan sumber pendanaan tambahan (Mardiasmo, 2021).

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa manajemen pembiayaan sektor publik harus dilakukan secara hati-hati. Defisit anggaran yang berlebihan atau bergantung terlalu banyak pada pinjaman bisa memiliki dampak jangka panjang yang buruk terhadap ekonomi suatu negara, seperti meningkatnya beban utang, pembayaran bunga yang tinggi, dan kemungkinan ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan pembiayaan sektor publik harus seimbang, mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam membangun infrastruktur dan memberikan

layanan penting kepada masyarakat, sambil juga memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang bagi pemerintah dan ekonomi secara keseluruhan (Mahmudi, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. (2023) 'Implementasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia', *Mediastima*. Available at: <http://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/mediastima/article/view/1019>.
- Costari, N. and Belinda, P. A. (2021) 'Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan', *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi* Available at: <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/view/421>.
- Ega, M. F. (2022) 'Analisis Pengaruh Kepemilikan Publik, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Dan Biaya Politik Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Sektor Property ...', *FIN-ACC (Finance Accounting)*. Available at: <https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/finacc/article/view/2454>.
- Hartoto, H. *et al.* (2023) *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. books.google.com. Available at: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=sU3HEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA128&dq=akuntansi+sektor+publik&ots=TqaGeeaspG&sig=lekGAo81iA3PjnethbX6mNk3iEI>.
- Hendrianto¹, S. A. and Indrawan, A. (2022) 'Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah', *BALANCE: Economic, Business* academia.edu. Available at: <https://www.academia.edu/download/93173269/pdf.pdf>.
- Kitna, H. M., Primastiwi, A. and ... (2020) 'Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kinerja Sektor Publik Dengan Variabel Moderasi', *JAE (JURNAL AKUNTANSI* Available at: <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14028>.

- Kristiyani, D. and HAMIDAH, H. (2020) 'Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital', *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Available at: <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/732>.
- Mahmudi (2016) *Akuntansi Sektor Publik*. 3rd edn. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo, M. (2006) 'Perwujudan Transparansi Dari Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance', *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), pp. 1–17.
- Mardiasmo, M. (2018) *Buku Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. 1st edn. Yogyakarta: Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021) *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. books.google.com. Available at: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=pBVCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=akuntansi+sektor+publik&ots=z6qrXs-eME&sig=W4rxIkMt3AsgsEe9Ko7eeK9JuRg>.
- Paramitha, M. (2021) ... *DAN UKURAN KANTOR AKUNTANSI PUBLIK TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN AUDITOR SWITCHING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (PADA SEKTOR* rama.mdp.ac.id. Available at: <http://rama.mdp.ac.id:85/id/eprint/242>.
- Primastiwi, A., Wardani, D. K. and Kitna, H. M. (2020) 'Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kinerja Sektor Publik Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi', *Akuntansi & Ekonomi*. karya.brin.go.id. Available at: https://karya.brin.go.id/19342/1/Jurnal_Anita_Primastiwi_Universitas_Sarjanawiyata_Tamansiswa_Yogyakarta_2020-3.pdf.
- Putra, P. A. (2021) 'PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN KETAATAN PADA ...', *Juhanperak*. Available at: <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1737>.

- Putri, N. K. and Maghfiroh, S. (2022) 'PENCATATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK', *Universitas*. download.garuda.kemdikbud.go.id. Available at: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3457768&val=30162&title=PENCATATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3457768&val=30162&title=PENCATATAN%20AKUNTANSI%20SEKTOR%20PUBLIK).
- Rezeki, T. R. (2022) *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor*. repository-feb.unpak.ac.id. Available at: <https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/5161>.
- Salsabila, N. (2023) 'Pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap ...'. etheses.uin-malang.ac.id. Available at: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54292>.
- SAPUTRI, R. (2023) *Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan* repository.untad.ac.id. Available at: <https://repository.untad.ac.id/13950/>.
- Saskia, N. A., Amin, M. and Junaidi, J. (2020) '... Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, Value For Money Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik', *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Available at: <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8532>.
- Septiani, S., Defitri, S. Y. and Sukraini, J. (2022) 'Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:(Studi Empiris Pada OPD ...', *Jurnal Ekonomi, Bisnis* Available at: <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/67>.
- SUDRAJAT, M. and Lasminto, L. (2022) 'SUMBER PENDAPATAN, AKUNTANSI DAN AUDIT PADA ENTITAS SEKTOR PUBLIK'. eprint.unipma.ac.id. Available at: [http://eprint.unipma.ac.id/282/1/Buku Pak Agus](http://eprint.unipma.ac.id/282/1/Buku%20Pak%20Agus)

Sudrajat.pdf.

Wijayanti, R. P. and Setyawan, S. (2023) 'Literature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik', *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI* Available at: <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/334>.

Yuesti, A., Dewi, N. and Pramesti, I. (2020) 'Akuntansi Sektor Publik'. eprints.unmas.ac.id. Available at: [http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/497/2/Hasil Turnitin Akuntansi sektor publik.pdf](http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/497/2/Hasil%20Turnitin%20Akuntansi%20sektor%20publik.pdf).

BAB 2

KONSEP, KARAKTERISTIK DAN RUANG LINGKUP

Oleh Safrizal

2.1 Pendahuluan

Akuntansi sebagai suatu proses yang dimulai dari transaksi atas suatu aktivitas yang dijalankan dalam rangka menghasilkan sebuah informasi, berguna bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan kebijakan. Akuntansi tidak hanya berlaku untuk organisasi privat namun telah diterapkan pada sektor publik, akuntansi sektor publik sebagai sebuah aktivitas jasa mulai dari pencatatan, klasifikasi, hingga melaporkan segala bentuk kejadian ekonomi yang dikelola untuk menghasilkan informasi bagi stakeholder dalam pembuatan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan keuangan dana publik dilingkungan pemerintahan maupun organisasi publik nonprofit lainnya.

2.2 Peran Penting Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik saat ini memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan. Terselenggaranya pemerintahan tidak terlepas dari penerapan akuntansi. Beberapa peran penting akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi publik

Transparansi sebagai wujud keterbukaan informasi kepada publik dengan memberikan kemudahan akses bagi seluruh pengguna yang memiliki kepentingan. Terselenggaranya sistem akuntansi yang baik oleh pemerintah akan membantu masyarakat dalam memahami informasi yang disediakan dengan mudah. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah.

2. Pengukuran kinerja pemerintah

Kinerja sebagai cerminan dari hasil kerja yang telah dihasilkan selama periode tertentu. Hadirnya akuntansi sektor publik memberikan peran bagi pemerintah dalam mengukur kinerja disetiap lini pemerintah, baik kinerja keuangan maupun nonkeuangan. Sehingga pemerintah akan mampu melihat bagian yang perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pusat perhatian. Dengan demikian akuntansi sektor publik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

3. Penyediaan akurasi informasi keuangan

Laporan keuangan sebagai informasi yang dihasilkan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi selama periode tertentu. Informasi yang dihasilkan secara tepat waktu dan akurat akan mampu menciptakan ketepatan dalam pengambilan keputusan yang tidak bias, sehingga akan mampu meminimalkan resiko keuangan.

2.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik sebagai ciri khas dan sebagai pembeda antaranya akuntansi sektor privat dan sektor publik. Menurut (Indra, 2010) karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut :

Tabel 2.1. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Tujuan	Mensejahterakan rakyat bertahap yang berkeadilan
Aktivitas	Memberikan pelayanan publik dalam segala pendidikan, kemandirian, kesehatan, hukum, transportasi, dan bidang lainnya
Sumber Pembiayaan	Berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan retribusi, serta sumber lainnya yang dikelola oleh negara/daerah
Pola Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat melalui lembaga

	perwakilan rakyat atau lembaga sosial masyarakat yang berwenang.
Kultur Organisasi	Cenderung bersifat birokrat, bertingkat dan formal
Penyusunan Anggaran	Dilakukan bersama masyarakat melalui forum musyawarah dalam perencanaan anggaran dan didiskusi bersama masyarakat, selanjutnya dilakukan pengesahan hingga pelaksanaan anggaran oleh lembaga yang berwenang (DPR/DPRD/DPD).
<i>Stakeholder</i>	Masyarakat Indonesia : pegawai publik, investor, kreditor, lembaga internasional, pemerintah luar negeri dan lainnya.

Sumber : (Indra, 2017)

Karakteristik dari akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh lingkungan yang kompleks sesuai dengan budaya masing-masing wilayah. Namun perlu diingat bahwa akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi swasta dengan beberapa aspek berikut :

Tabel 2.2. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Privat

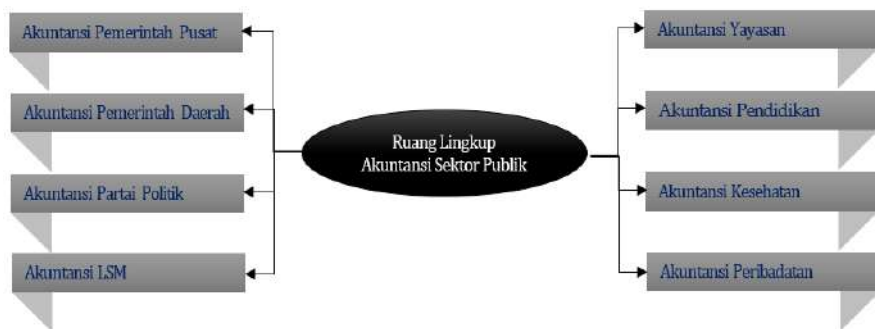
Keterangan	Publik	Privat
<i>Goal</i>	<i>Nonprofit</i>	<i>Profit oriented</i>
<i>Funding</i>	Pajak, Penjualan aset, Laba BUMN/BUMD	Modal sendiri, Utang bank obligasi
<i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban kepada publik dan DPR/DPRD	Stakeholder : Pemegang saham, Kreditor
<i>Structure</i>	Kaku, Hierarki, Birokratis	Fleksibel, Pyramid, Lintas fungsional
<i>Budgeting</i>	Terbuka	tertutup
<i>System</i>	<i>Cash basic</i>	<i>Accrual basic</i>

Sumber : (Mardiasmo, 2017)

Perlu diingat bahwa untuk sistem akuntansi sektor publik khususnya sudah sejatinya menggunakan *accrual basic system* sepenuhnya sesuai dengan (PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010), akan tetapi dalam pencatatan keuangan terkait pencatan pada jurnal anggaran dan berdampak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Laporan Saldo Anggaran Lebih, maka tetap menggunakan *cash basic*.

2.4 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Disadari bahwa luasnya pembukuan akuntansi publik dapat dianggap sebagai akibat dari berbagai kemajuan pemikiran yang ada. Secara eksplisit di Indonesia, cakupan asosiasi wilayah publik mencakup lembaga-lembaga tinggi negara dan divisi-divisi di bawahnya, badan legislatif teritorial, lembaga-lembaga, kelompok ideologi, perguruan tinggi, dan asosiasi publik nirlaba. Tentu saja, siklus perincian dan pertanggungjawaban kepada masyarakat umum diatur dalam struktur prinsip pembukuan area publik.



Gambar 2.1. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Pemerintah Pusat

Akuntansi pemerintah pusat mencakup prinsip-prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang digunakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pusat

terkait pendapatan dan belanja negara. Bagi entitas pemerintah pusat yakni entitas akuntansi dan pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas, mulai dari laporan realisasi anggaran, operasional, neraca, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, arus kas, hingga catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan akuntansi pemerintah pusat dalam praktek akuntansi yang dijalankan. Disamping itu jenis laporan keuangan yang dihasilkanpun juga sama, hanya saja pada akuntansi pemerintah daerah berfokus pada pelaksanaan anggaran dan belanja yang menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Akuntansi Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah organisasi yang didirikan dalam rangka penguasaan kewenangan dalam aktivitas politik, terdiri dari ketua dan para anggota berserta jajaran parpol. Akuntansi dalam partai politik tidak terlepas dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Sumber dana partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan baik perusahaan maupun dindividu, subsidi dana dan fasilitas publik, serta sumber lainnya yang digunakaikan dalam kegiatan politik. Sebagai paratai politik, maka setiap oraganisi politik wajib membuat laporan keuangan baik laporan tahunan maupun laporan pelaksanaan pemilu setiap tahunnya. Jenis laporan keuangan partai politik yang dihasilkan yakni laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, serta laporan laporan arus kas.

Akuntansi LSM (Lembaga swadaya masyarakat)

Lembaga swadaya masyarakat, juga dikenal sebagai LSM, adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau sekelompok

orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bermaksud mendapatkan keuntungan finansial dari operasinya. Organisasi non-pemerintahan ini tidak termasuk dalam pemerintah, birokrasi, atau negara. Sumber utama pendanaan partai politik tidak lepas dari sumbangan yang berasal dari iuran anggoran dan penngurus, dan sumber lainnya dalam parpol tersebut.

Akuntansi Yayasan

Yayasan sebagai organisasi nirlaba yang berbadan hukum dengan kekayaan yang terpisah dan dialokasikan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan memiliki aktivitas utama adalah kegiatan sosial kemanusiaan dengan sumber pendanaan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, sumbangan masyarakat, wakaf, hibah baik barang maupun uang, serta wasiat dan tentunya tidak melanggar anggaran dasar didirikannya yayasan tersebut. Terkait pengelolaan keuangan yayasan didasarkan pada (*Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, 2004). Laporan keuangan yayasan meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, serta laporan arus kas (*PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*, 2014).

Akuntansi Pendidikan

Akuntansi pendidikan merupakan salah satu ilmu pendidikan akuntansi yang umum dalam tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan atas hingga terperinci pada tingkat perguruan tinggi. Salah satu peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan data kuantitatif berupa laporan keuangan. Sehingga akan mampu membantu dalam perancangan kebijakan yang tepat dan sesuai di bidang pendidikan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pendidikan setidaknya mengikuti tiga tahapan dalam akuntansi. Pertama tahap pencatatan yakni identifikasi dan pengukuran bukti atas transaksi ekonomi yang terjadi dalam kegiatan pendidikan, kemudian dilakukan pencatatan dalam jurnal serta dikelompokkan dalam buku besar.

Selanjutnya tahap pengikhtisaran dimana akuntansi pendidikan ini terkait penyusunan neraca saldo yang didasarkan pada posting buku besar, penyusunan jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup dan diakhiri dengan jurnal pembalik.

Tahap terakhir ialah pelaporan, dimana dilakukannya penyusunan laporan keuangan dalam dunia pendidikan terdiri atas laporan neraca, laporan surplus/defisit, serta laporan arus kas dalam satu periode akuntansi.

Akuntansi Kesehatan

Akuntansi kesehatan sebagai cabang ilmu akuntansi yang membahas ruang lingkup penyediaan unit pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam bahasan ini akuntansi kesehatan terdiri atas akuntansi rumah sakit dan akuntansi puskesmas.

Akuntansi Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai unit pelaksanaan pekerjaan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Dalam akuntansi sektor publik rumah sakit ini merupakan unit yang didirikan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Saat ini sebagian besar rumah sakit yang dikelola pemerintah adalah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), dimana adanya kewenangan bagi setiap rumah sakit dalam mengelola urusan organisasi atas pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah secara mandiri (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah*, 2018). Dalam penyelenggaraan keuangan, rumah sakit wajib membuat laporan keuangan sebagaimana entitas akuntansi pada sektor publik. Salah satu kewajiban tersebut ialah menyelenggarakan pelaporan keuangan mulai dari neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan sebagaimana posisi dibawah naungan dinas kesehatan. Disamping itu sebagai rumah sakit berstatus BLUD, juga menyajikan laporan berupa laporan hasil usaha yang merupakan kegiatan atas penyelenggaraan aktivitas rumah sakit, walaupun mencari laba bukan merupakan tujuan utama,

namun rumah diperbolehkan memperoleh keuntungan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu rumah sakit juga menyediakan laporan posisi keuangan yang berisikan harta, kewajiban dan modal. Laporan keuangan yang selanjutnya disajikan rumah sakit yakni laporan arus kas, yang berisikan aktivitas operasional, investasi dan pendanaan selama periode akuntansi. Proses akuntansi yang ada pada rumah sakit sama halnya dengan entitas lainnya, dimulai dari pencatatan akibat adanya transaksi hingga penyajian informasi keuangan. Dan laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh auditor independen yang ditunjuk oleh entitas untuk dilakukannya pemeriksaan.

Akuntansi Puskesmas

Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat atau yang dikenal Puskesmas merupakan fasilitas layanan kesehatan yang ada di Indonesia dan tersebar diberbagai wilayah yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelayanan individu pada tingkat pertama yang sifatnya promotif dan preventif (*Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tentang Batas Daerah Kabupaten Tahun 2014*, no date). Dalam aktivitas akuntansi yang dijalankan akuntansi puskesmas tidak jauh berbeda dengan akuntansi rumah sakit, hanya saja ruang lingkup serta pendanaan yang berbeda dari yang lain, diantaranya ruang cakupan yang lebih kecil.

Akuntansi Tempat Peribadatan

Organisasi peribadatan dapat dicirikan sebagai perkumpulan yang menekankan pada perkembangan yang berkaitan dengan agama tertentu, yang juga menangani masalah ibadah atau pemenuhan komitmen terhadap agama atau keyakinan tertentu. Sehingga peribadatan mengacu pada perkumpulan pada tempat tertentu, misalnya masjid, gereja, kuil dan klenteng, wihara dan tempat suci lainnya. Secara keseluruhan, perkumpulan peribadatan dikendalikan oleh yayasan atau perkumpulan yang muncul karena pelaksanaan visi dan misi agama tertentu (Indra, 2007).

Secara umum, akuntansi dalam pengelolaan keuangan yang dimaknasi sebagai tindakan yang diorganisasikan dalam

organisasi untuk mencapai tujuannya. Pada ruang lingkup organisasi peribadatan, manajemen keuangan sebagai pekerjaan yang dijalankan oleh masyarakat dan pengelola atas dana yang diterima baik donasi atau sumbangan maupun hibah serta lainnya yang diperoleh dengan cara yang benar sesuai ajaran yang dianut. Penyajian laporan keuangan organisasi peribadatan terdiri atas laporan penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, dan arus kas, neraca, kalk. Namun umumnya hanya laporan penerimaan dan pengeluaran saja yang sebagian besar terlihat ditempat peribadatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indra, B. (2007) *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Indra, B. (2010) *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Indra, B. (2017) *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. 3rd edn. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo (2017) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah* (2018).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tentang Batas Daerah Kabupaten Tahun 2014* (no date).
- PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (2010).
- PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* (2014).
- Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan* (2004).

BAB 3

URGENSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Wulandari Pryangan

3.1 Pendahuluan

Akuntansi sektor publik yang diimplementasikan pada sektor pemerintahan, menggunakan data yang diperoleh dari akuntan guna memberikan informasi kepada otoritas eksekutif, legislatif, maupun publik yaitu masyarakat umum, terkait situasi ekonomi dan pengelolaan keuangan di sektor publik. Dengan kata lain, bahwa sistem akuntansi menjadi sarana pelaporan publik atas kegiatan yang telah dilakukan selama periode tahun tertentu (Silalahi, dkk. 2023).

Hadirnya akuntansi sektor publik sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui administrasi publik yang akuntabel. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pemangku kepentingan atas APBN/APBD yang dikelola untuk periode tahun berjalan (Ajiani, dkk. 2022).

Salah satu tonggak sejarah perkembangan akuntansi sektor publik adalah peralihan standar akuntansi yang semula menggunakan akuntansi berbasis kas menuju standar yang berlaku saat ini yaitu akuntansi berbasis akrual. Transisi ini merupakan tonggak sejarah dalam era peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang mendukung tercapainya kebijakan publik yang baik serta dalam rangka mendukung terlaksananya asas pengelolaan keuangan negara (Andhayani, 2017).

Akuntansi di sektor publik berkaitan dengan aspek-aspek seperti penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik adalah alat informasi bagi pemerintah dan manajer, dan untuk masyarakat. Bagi

pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses manajemen bisnis mulai dari perencanaan strategis, pengembangan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Sari, 2016).

Instansi pemerintah adalah lembaga yang terdaftar pada suatu instansi pemerintahan dengan tugas menjalankan fungsi atau pelayanan administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan pendanaan APBN/APBD. Suatu bentuk hubungan yang terbuka terhadap masyarakat, instansi pemerintah harus berfungsi dengan baik, akuntabel, memiliki integritas, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan bangsa dan masyarakat (Costari, dkk. 2021).

Transparansi saat ini lebih banyak ditujukan pada instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena kegiatan pemerintahan menggunakan sistem keuangan publik, dimana dana alur pendanaan berasal dari pemerintah pusat lalu diserahkan ke pemerintah daerah sebagaimana ketentuan otonomi daerah. Pendistribusian dana ini didasarkan pada potensi, kondisi, serta kebutuhan masing-masing daerah (Costari, dkk. 2021).

Tugas utama akuntan publik adalah menyiapkan laporan. Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu jenis akuntabilitas publik. Akuntansi dan pelaporan keuangan didefinisikan sebagai proses pengumpulan, penyusunan, dan pembahasan informasi untuk membantu mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja (Silalahi, dkk. 2023).

Kepatuhan dan pengendalian dalam pelaporan keuangan sektor publik disusun berdasarkan tujuan dan fungsinya. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk meyakinkan konsumen dan pihak berwenang bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Silalahi, dkk. 2023).

Laporan keuangan menjadi bagian yang wajib disusun dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk khususnya bagi instansi yang kegiatannya berdasarkan APBN/APBD. Laporan keuangan sebagai alat pengendalian untuk memantau kinerja dan manajemen yang tepat, memastikan perkembangan dari waktu ke waktu dan pencapaian tujuan yang telah ditentukan,

serta membandingkan kinerja organisasi serupa jika diperlukan. Pihak ketiga juga dapat menafsirkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi berdasarkan informasi perencanaan dan persetujuan sebagai hasil dari proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan berfungsi pula sebagai dasar untuk melakukan perencanaan di masa depan sebagaimana tujuan dari laporan keuangan itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi tambahan terkait pengalokasian dana serta keberlangsungan hidup organisasi (Silalahi, dkk. 2023).

3.2 Urgensi Akuntansi Sektor Publik

Dalam konteks akuntansi sektor publik, pemerintah sebagai lembaga kepentingan publik harus menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dalam operasionalnya. Akuntabilitas pemerintah sebagai wujud tanggung jawab atas misi pencapaian tujuan serta sasaran yang disepakati melalui langkah-langkah akuntabilitas yang terencana (Rohim, dkk. 2022).

3.3.1 Kebijakan Akuntansi

Kuangan negara mengalami reformasi yang juga berdampak pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Reformasi tersebut ditandai dengan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan pemerintah yang biasanya terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya (Satya, 2020).

Kebijakan akuntansi pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempedomani entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kebijakan akuntansi juga memuat pedoman penerapan sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan. Oleh sebab itu, perlunya perhatian khusus yang harus diberikan pada saat menyiapkan instrumen kebijakan akuntansi yang mana bagian

pembahasannya memuat penjelasan terkait dampak atau metode yang akan dipilih (Ratna, dkk. 2023).

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu acuan yang wajib dalam menyajikan laporan keuangan khususnya pada instansi pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP. Melalui penerapan SAP, para pengguna laporan keuangan mendapatkan manfaat atas informasi-informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Selain itu, bagi auditor eksternal (BPK) melalui SAP menjadi dasar pemeriksaat audit (Manossoh, 2015).

Saat ini pemerintah memberlakukan standar yaitu SAP berbasis akrual sebagai suatu pedoman pelaporan bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah guna mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan negara (Andhayani, 2017).

Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya dicatat pada saat terjadinya dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi akrual, waktu yang dicatat sesuai dengan waktu terjadinya aliran sumber daya, dan semua aliran sumber daya dicatat untuk memberikan informasi selengkap mungkin. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual diharapkan berkontribusi dalam memberikan manfaat yang lebih besar kepada pemangku kepentingan, seperti oleh pengguna maupun auditor laporan keuangan pemerintah. (Satrio, dkk. 2016).

3.3.2 Perencanaan Anggaran Sektor Publik

Perencanaan merupakan komponen utama anggaran, yaitu rencana keuangan masa depan suatu entitas yang menggambarkan tujuan entitas yang ingin dicapai. Penganggaran di sektor pemerintah diatur melalui peraturan menteri keuangan yang menjabat sebagai bendahara umum negara. Dalam level satuan kerja, rencana kerja dan anggran disebut dengan istilah RKA-Satker yang memuat di dalamnya rencana kinerja, rincian belanja, target pendapatan, serta perkiraan terkait rencana belanja dan target pendapatan satker. Selanjutnya RKA-KL disusun dengan pendekatan sistem penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK),

serta kerangka pengeluaran jangka menengah (Biswan, dkk 2021).

Anggaran publik adalah dokumen yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan, yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya. Anggaran berisi perkiraan tentang apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan. Setiap anggaran memberikan informasi tentang apa yang harus dilakukan pada periode berikutnya (Sari, 2016).

Sektor publik dalam kegiatannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelayanan yang baik. Anggaran pada sektor publik mempunyai fungsi utama sebagai alat perencanaan, alat kebijakan, alat kebijakan fiskal, alat komunikasi, alat manajemen, alat koordinasi, alat evaluasi kerja, alat motivasi, dan alat perancangan ruang publik (Anggraeni, dkk. 2020).

Integrasi dan sinergi antara perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk ditekankan. Bukan hanya terjadi pada perencanaan dan penganggaran, ketidaksinkronan juga bisa terjadi pada dokumen perencanaan itu sendiri. Sebagaimana ditunjukkan pada capaian pembangunan nasional yang biasanya termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemertintah (RKP), sehingga perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah (Pratiwi, 2019).

Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah harus dibagikan secara merata untuk publik. Kebutuhan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kegiatan yang diprioritaskan untuk kepentingan publik. Pada tahap inilah tujuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dilakukan. dengan harapan bahwa publik dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan yang baik (Anggraeni, dkk. 2020).

New Public Management atau NPM memulai era barunya pada sektor publik. NPM merupakan suatu pendekatan dalam anggaran dengan basis kinerja pada manajemen kinerja sektor publik. Pendekatan ini dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam merancang dan menyusun program

yang konsisten serta relevan dengan tujuan pembangunan (Ariesmawati, 2020).

Tuntutan akan tanggung jawab keuangan, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan di sektor publik mengharuskan adanya perubahan terhadap organisasi tersebut. Adapun NPM hadir sebagai perwujudan dari otonomi daerah yang memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rizky, dkk. 2019).

3.3.3 Kualitas Laporan Keuangan

Setelah instansi pemerintah menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa, menyusun anggaran, dan melaksanakan anggaran, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat. Laporan tersebut kemudian diperiksa untuk menentukan kebenaran dan memberikan penjelasan (Payo, 2023).

Laporan keuangan yang tepat tergantung pada kemampuan dan akuntabilitas pihak yang melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut. Kualitas laporan keuangan berpengaruh atas baik tidaknya akuntabilitas kinerja suatu instansi. Apabila laporan keuangan yang disampaikan berkualitas baik maka dapat diartikan pula bahwa tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab yang diemban juga baik (Peilouw, dkk. 2023).

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, peran akuntansi sektor publik dalam penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting. Laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas agar dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan harus diserahkan kepada pemerintah secara tepat waktu serta andal. Hal ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (Sari, dkk. 2022).

Laporan keuangan haruslah berupa laporan yang relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat diperbandingkan sehingga dapat disebut sebagai laporan yang berkualitas. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya sumber daya manusia yang juga mempunyai, seperti dalam mengaplikasikan SAP untuk

penyusunan laporan keuangan. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir ketidakpatuhan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti kelemahan sistem pengendalian akuntansi, pencatatan akuntansi yang belum tepat, belum sesuai ketentuan SAP, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tersedia belum memadai. Dengan demikian, berdasarkan kemampuan SDM yang memadai diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang juga sama berkualitasnya (Defana, dkk. 2023).

3.3.4 Akuntabilitas

Sebagai organisasi publik yang fungsi utamanya yaitu memberikan layanan yang terbaik untuk publik, tuntutan terhadap pemerintah atas transparansi dan akuntabilitas publik menjadi semakin tinggi. Komitmen atas akuntabilitas dan transparansi kepada publik sebagai wujud dari tanggung jawab sektor publik khususnya pemerintah atas misi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar para pelaksana kegiatan di sektor publik dapat konsisten dan patuh mengemban tanggung jawab yang diberikan (Rohim, dkk. 2022).

Akuntabilitas pada sektor publik berkaitan dengan penyajian serta pelaporan semua kegiatan publik utamanya dibidang administrasi keuangan. Oleh karena itu, perlunya penempatan SDM yang berkualitas, mampu memahami tugasnya dengan baik. Akuntabilitas dapat menyajikan baik itu selisih maupun penyimpangan atas rencana dan realisasi kegiatan sehingga sebagai tolak ukur untuk melihat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang diharapkan. Pada akhirnya, efektivitas terhadap keberhasilan akuntabilitas publik bergantung pada kemampuan SDM yang melakukan pengelolaan, penyusunan serta pelaporan kepada publik dengan memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku (Ayumiati, 2018).

Salah satu bentuk akuntabilitas yang diupayakan terus menerus oleh sektor publik yaitu dengan laporan keuangan publik yang berkualitas. Tentu upaya ini memerlukan SDM yang memiliki kemampuan baik dalam memahami cara penyusunan

dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan SAP. Diharapkan dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kepada publik turut serta meningkatkan kepercayaan publik pada pengelolaan pemerintah (Ratna, dkk. 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiani, I.P.F. dkk. 2022. Pandangan Akuntansi Sektor Publik Terkait Akuntabilitas Pasca Bencana di Nusa Tenggara Barat. *REKAN : Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 97–106.
<https://doi.org/10.30812/rekan.v3i2.2132>.
- Andhayani, A. 2017. Dilema Akrualisasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (48), 291–307.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7055>.
- Anggraeni, C., dkk. 2020. Prinsip-Prinsip Anggaran Publik pada Organisasi Publik di Era Pandemi COVID-19. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), pp. 1–11.
<https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.9>.
- Ariesmawati, Y. 2020. Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2), 258–269.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.13>.
- Ayumiati. 2018. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(2), 49–66.
<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3257>.
- Biswan, A.T., dkk. 2021. Penajaman Peran Penganggaran Sektor Publik Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 58–77.
<https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341>.
- Defana, F.A., dkk. 2023. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 21–30.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2681>.

- Manossoh, H. 2015. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Government Governance pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), pp. 777–789.
- Costari, N., dkk. 2021. Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *JAMANTA : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421.
- Payo, M. 2023. Kualitas Laporan Keuangan: Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kementerian Perhubungan BPTD Kelas II Provinsi Gorontalo). *SOLUSI: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 138–147.
- Peilouw, C.T., dkk. 2023. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). *BIJAK: Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 5(1), 111–112. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9641>.
- Pratiwi, D.R. 2019. Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Perumahan dan Permukiman pada Pemerintah Pusat. *Jurnal Budget*, 4(2), 82–105.
- Ratna, dkk. 2023. Peranan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 25–33.
- Rizky, H.P., dkk. 2019. Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 8(2), 94–116. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4647>.
- Rohim, M.A.A., dkk. 2022. Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(02), 37–48.
- Sari, A.P., dkk. 2022. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara).

- JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 7(2), 172–181.
<https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17714>.
- Sari, R.M. 2016 Rencana Anggaran Keuangan Daerah Basis Konsep Peran Akuntansi Sektor Publik (Studi pada Pemda Kabupaten Tulungagung). *KOMPILEK: Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, 8(1), 1-10. www.stieken.ac.id.
- Satrio, M.D., dkk. 2016. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1), 59–69.
<https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>.
- Satya, V.E. 2020. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Provinsi Jawa Barat. *Kajian*, 25(2), 145–160. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/>.
- Silalahi, A.D., dkk. 2023. Pentingnya Akuntansi Sektor Publik di Institusi Pemerintahan. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 192–199.
<https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.592>.

BAB 4

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Adhi Alfian

4.1 Pendahuluan

Fungsi akuntansi pada organisasi berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, dan mengomunikasikan informasi aktivitas organisasi dengan menggunakan satuan keuangan. Pemanfaatan informasi dimaksud dapat digunakan oleh pengguna internal maupun eksternal dalam membantu pengambilan keputusan sesuai tugas dan kepentingannya masing-masing. Sebagai contoh, manajemen memanfaatkan informasi akuntansi untuk memutuskan langkah peningkatan efektifitas dan efisiensi operasi, pemilik untuk mengembangkan lini usaha, kreditur untuk memutuskan pemberian bantuan pembiayaan, pemerintah dalam menentukan besaran pajak terhutang, dan lain sebagainya.

Agar kepentingan-kepentingan diatas dapat terpenuhi, tentu saja penyajian dalam laporan keuangan harus dapat diyakini keandalannya, disamping tentu juga bahasa maupun penyajian laporan keuangan dimaksud harus memiliki standar yang baku. Penggunaan standar dimaksud akan bermanfaat diantaranya untuk membandingkan perkembangan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, atau juga bermanfaat untuk membandingkan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain.

Standar yang mengatur tentang pedoman pencatatan dan pelaporan keuangan biasa disebut sebagai standar akuntansi. Standar akuntansi digunakan sebagai pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan, dan merupakan pedoman penggunaan metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan

keuangan. Seiring perkembangan tujuan, proses, dan regulasi, standar akuntansi juga dapat mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti perkembangan dimaksud. Perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan mengubah standar yang sudah ada, menambah detail pengaturan, atau bahkan sampai membuat standar baru yang belum diatur sebelumnya. Umumnya perubahan tersebut diputuskan oleh komite standar pada suatu badan/lembaga pembuat standar akuntansi, berdasarkan masukan dan kajian kebutuhan pengembangan standar akuntansi.

Berdasarkan pertimbangan perbandingan laporan keuangan, saat ini terdapat pengelompokan jenis laporan keuangan. Pengelompokan ini juga dilakukan atas pertimbangan perbedaan karakteristik organisasi dalam menjalankan *nature* proses operasinya. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain terdiri dari:

1. Standar Akuntansi Keuangan (dengan konvergensi IFRS), merupakan standar akuntansi yang umumnya digunakan untuk entitas bisnis, dimana sebagian pengaturan yang diatur dalam standar ini sudah mengadopsi standar akuntansi internasional. Dampaknya adalah perusahaan yang menyusun laporan keuangan dengan standar ini dapat dipahami atau diperbandingkan dengan laporan keuangan dari negara lain.
2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), adalah standar akuntansi yang banyak digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik cukup signifikan, seperti kegiatan usaha kecil. Biasanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh kelompok entitas ini merupakan laporan untuk tujuan umum pengguna ekstern di luar lingkup organisasi.
3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), merupakan kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai standar yang digunakan dalam proses pencatatan dan penyusunan

laporan keuangan instansi pemerintah di Indonesia, baik itu untuk instansi pemerintah pusat dan juga instansi pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

5. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yaitu standar akuntansi yang digunakan untuk tujuan pemenuhan proses pelaporan dan pencatatan keuangan untuk entitas usaha mikro, kecil, dan menengah.

Khusus untuk sektor publik, penggunaan standar akuntansi harus dilakukan sesuai dengan karakteristik organisasinya. Berdasarkan lima pengelompokkan standar akuntansi keuangan diatas, umumnya organisasi sektor publik diarahkan untuk menggunakan SAK ETAP, SAK EMKM, ataupun SAP khusus untuk sektor pemerintahan. Namun dimungkinkan juga organisasi sektor publik menggunakan PSAK berbasis IFRS ataupun SAK Syariah jika terdapat kegiatan operasional ataupun pelayanannya yang terkait dengan pengaturan dimaksud. Secara global standar akuntansi keuangan untuk sektor publik juga sudah secara spesifik diatur dalam *International Publik Sektor Accounting Standards* (IPSAS). Standar IPSAS dikeluarkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC), merupakan organisasi sama yang mengeluarkan standar akuntansi keuangan untuk sektor bisnis atau dikenal sebagai IFRS.

Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan dibahas secara lebih mendetail bagian-bagian yang diatur dalam standar akuntansi untuk organisasi sektor publik.

4.2 Karakteristik dan Lingkungan Akuntansi Sektor Publik

Seperti yang sudah disebutkan dalam bagian pengantar sebelumnya, pelaporan keuangan dilakukan untuk tujuan penyediaan informasi suatu organisasi dari sisi finansial sebagai bahan pertimbangan investor, manajemen, pemberi pinjaman, maupun pihak lain untuk mengambil keputusan. Adapun pada sektor publik, pelaporan keuangan secara lebih spesifik juga

dilakukan untuk tujuan penyediaan informasi finansial entitas yang untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan sumber dana dari publik untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan.

Agar mendapatkan pemahaman mendasar tentang perbedaan sektor publik dengan sektor privat/bisnis, berikut dilampirkan karakteristik pembeda dari kedua jenis organisasi tersebut:

Tabel 4.1. Perbandingan Sektor Publik dan Privat

No	Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Privat
1	Tujuan Organisasi	Motif non profit	Motif profit
2	Sumber Pendanaan	• Dana masyarakat, pemerintah, atau keuntungan dari kegiatan operasional dan non operasional • Sumbangan, donor • Hibah	• Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. • Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham.
3	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawab an kepada publik/masyarakat dan lembaga pengawas/legislatif	Pertanggungjawa ban kepada pemegang saham dan kreditor
4	Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan hirarki	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional
5	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Untuk kalangan internal

Berdasarkan penggambaran diatas, dapat dilihat bahwa terdapat *nature* yang cukup membedakan antara sektor publik dan privat. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya yaitu pada sektor publik mereka tidak didorong untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan sumber dana dapat dimungkinkan berasal dari publik, sehingga pelaporan penggunaan dana juga harus dilakukan secara terbuka untuk seluruh publik yang terkait. Pengaplikasian standar akuntansi untuk sektor publik diharapkan akan meningkatkan konsistensi, kualitas, dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan oleh entitas-entitas publik.

Seperti yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, standar akuntansi sektor publik ada yang berbasis internasional (IPSAS) dan juga untuk konteks sektor publik di Indonesia. Perbedaan mendasar antara IPSAS dengan sebagian standar akuntansi sektor publik di Indonesia adalah pada IPSAS telah digunakan prinsip yang sesuai dengan IFRS yaitu *principle based*, sedangkan belum menganut sepenuhnya pada IFRS atau biasa dikenal sebagai *rule based*. Sebagai contoh dalam pengaturan konsep penurunan nilai aset secara permanen, proses revaluasi dalam rangka pengukuran aset tetap pada standar akuntansi publik, lebih khususnya pada standar pemerintahan misalnya belum mengakomodasi adanya transaksi pendapatan yang diperoleh melalui pertukaran, juga belum mengakomodasi dampak dari adanya pengaruh perubahan nilai pada mata uang asing.

4.3 Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

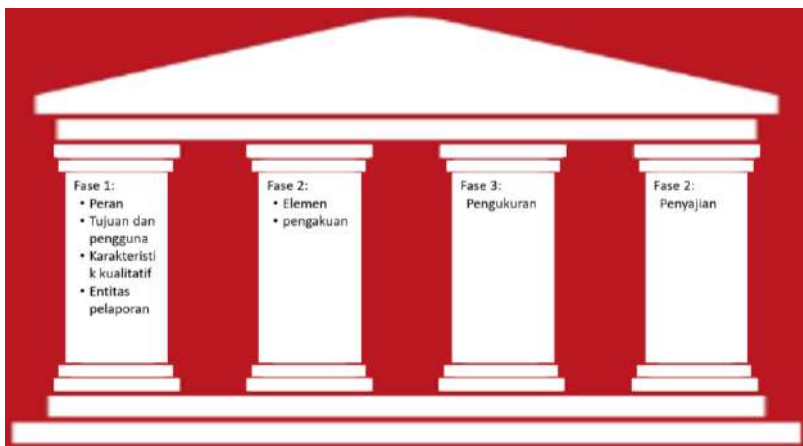
Kerangka konseptual akuntansi merupakan landasan struktur dasar dalam pelaksanaan proses akuntansi, didasarkan pada penalaran proses logis yang baku/berlandaskan pemahaman konseptual dalam transaksi ekonomi, kemudian menjelaskan pula mengenai prosedur yang perlu dilakukan dalam menyikapi fakta atau fenomena proses transaksi yang mungkin belum diatur sebelumnya. Kerangka konseptual inilah yang kemudian dijabarkan secara lebih mendetail dalam bentuk standar akuntansi, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa

kerangka konseptual merupakan landasan baku yang digunakan oleh penyusun standar akuntansi dalam membuat aturan. Disisi lain, kerangka konseptual juga dapat dijadikan sebagai prinsip dasar apabila terdapat hal-hal terkait dengan praktek akuntansi yang belum diatur oleh standar akuntansi.

Salah satu prinsip dasar dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan sektor publik yaitu pernyataan tentang tujuan laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi pengguna dalam rangka akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengguna informasi membutuhkan informasi yang dapat mendukung proses penilaian, yaitu:

1. Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan terkait dengan penyediaan barang atau jasa.
2. Segala sumber daya yang dimiliki oleh entitas dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyediaan pelayanan di masa mendatang, serta prinsip batasan yang perlu dimiliki dalam rangka pemanfaatannya.
3. Pengukuran biaya yang dibebankan kepada masyarakat atau pengguna layanan sektor publik yang telah diterima baik pada periode saat ini maupun untuk masa yang akan datang.
4. Pengukuran kemampuan organisasi dalam rangka penyediaan layanan dengan perbandingan periode sebelumnya atau dengan entitas lain yang serupa.

Berdasarkan tujuan tersebut kemudian disusun struktur kerangka konseptual yang terbagi dalam empat fase utama. Secara lebih lengkap struktur dimaksud dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



Gambar 4.1. Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Ilustrasi diatas menggambarkan aspek-aspek yang membentuk kerangka konseptual Akuntansi Sektor Publik dalam 4 pilar utama. Berikut ini merupakan penjelasan ringkas atas lingkup konseptual keempat pilar tersebut:

1. Fase satu:

- a. Peran. Bagian ini menjelaskan peran kerangka konseptual dalam memberikan arah pada proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian berbagai jenis transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pengguna standar akuntansi serta potensi penanganan masalah yang dapat dilakukan oleh standar dimaksud.
- b. Tujuan dan penggunaan. Bagian ini menjelaskan bahwa pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan entitas melalui alat pengukuran finansial untuk penggunaannya. Adapun yang dimaksud dengan pengguna adalah pihak yang menggunakan dan memahami esensi dari laporan keuangan yang dibacanya, kemudian memperoleh manfaat dari laporan tersebut.
- c. Karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif adalah gambaran karakteristik/kondisi yang harus dimiliki pada setiap laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi pada setiap organisasi sektor publik. Adapun karakteristik tersebut terdiri dari: relevansi, dapat diandalkan, dapat dipahami, ketepatan waktu, dapat

dibandingkan, dan dapat diverifikasi. Seluruh karakteristik tersebut adalah komponen yang saling berkaitan serta wajib untuk dimiliki sehingga tujuan dalam pelaporan keuangan dapat terpenuhi.

- d. Entitas pelaporan. Fungsi ini merupakan gambaran entitas/bagian dari organisasi sektor publik yang memiliki tugas penyusunan laporan keuangan. Entitas pelaporan dapat terdiri dari satu atau lebih entitas terpisah yang memiliki tugas untuk menyajikan laporan suatu organisasi sektor publik dalam satu kesatuan.

2. Fase dua:

- a. Elemen. Bagian ini merupakan deskripsi komponen yang disajikan dalam sebuah sistem pelaporan keuangan. Adapun elemen laporan keuangan diklasifikasikan terdiri dari: aset, kewajiban, pendapatan, beban, kontribusi kepemilikan, dan distribusi kepemilikan.
- b. Pengakuan. Bagian ini menggambarkan proses pengklasifikasian nilai yang disajikan pada setiap laporan keuangan organisasi sektor publik dalam masing-masing elemen pelaporan yang sesuai dengan melihat karakteristik kualitatif, serta mempertimbangkan prinsip penyampaian informasi untuk masing-masing laporan keuangan.

3. Fase tiga: Pengukuran. Pengukuran yaitu proses yang dilakukan untuk menentukan basis pengukuran yang paling sesuai dan mencerminkan untuk masing-masing elemen laporan keuangan. Sebagai contoh, pelaksanaan proses pengukuran yang tepat akan membantu pembaca laporan keuangan untuk memahami:

- a. Biaya yang dikeluarkan berdasarkan catatan historis yang dimiliki.
- b. Kapasitas operasional dalam mendukung kegiatan pelayanan pada periode yang akan datang.
- c. Kemampuan keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas operasional entitas.

4. Fase empat: Penyajian. Penyajian adalah rangkaian proses memilih, menempatkan, dan mengorganisasikan rangkaian informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Proses

penyajian ini penting untuk dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap kondisi/transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas/organisasi sektor publik. Proses pemilihan, penempatan, dan pengorganisasian elemen laporan keuangan secara tepat perlu dilakukan karena pada prinsip pelaporan keuangan, setiap elemen memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Keterkaitan dimaksud khususnya dalam konteks keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau dalam istilah transaksi keuangan dikenal sebagai *cost* dan *benefit*.

4.4 Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik

Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, penyajian laporan keuangan merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk menempatkan komponen dan nilai dari masing-masing elemen laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Esensi utama dari proses penyajian laporan keuangan yaitu memberikan cerita yang komprehensif atas kinerja keuangan organisasi sektor publik pada periode waktu tertentu. Umumnya kinerja keuangan tersebut dibagi dalam indikator kinerja operasional, keseimbangan sumber daya serta kewajiban dan ekuitas, arus keluar dan masuk kas, perubahan nilai bersih ekuitas, dan terakhir catatan atas masing-masing elemen laporan keuangan dimaksud.

Namun disamping itu, terdapat salah satu karakteristik yang cukup menonjol pada organisasi sektor publik, yaitu pengaturan yang cukup ketat pada batas anggaran khususnya dalam konteks pendapatan dan beban. Ruang lingkup sektor publik yang salah satunya menekankan kesesuaian antara rencana dan realisasi, menyebabkan perbandingan antara aspek perencanaan keuangan (anggaran) dengan realisasinya menjadi salah satu hal penting yang harus disajikan pada laporan keuangan sektor publik. Sehingga umumnya laporan atas realisasi anggaran ini akan menambah komponen laporan keuangan.

Adapun secara lebih lengkap terkait dengan komponen laporan keuangan pada organisasi sektor publik terdiri dari:

1. Neraca laporan keuangan. Laporan keuangan ini menyajikan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas sesuai dengan tanggal pelaporan keuangan. Rumus dasar yang digunakan dalam keseimbangan neraca ini yaitu $Aset = Liabilitas + Ekuitas$. Aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh entitas untuk memberikan layanan atau manfaat kepada pengguna layanannya di masa yang akan datang. Sementara liabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak lain untuk menjalankan kegiatan layanan. Adapun ekuitas merupakan klaim pemilik/pemodal atas aset yang dimiliki entitas.

	20X2	20X1
ASET		
Aset Lancar	X	X
Aset Tak Lancar	X	X
Total Aset	X	X
 LIABILITAS		
Liabilitas Lancar	X	X
Liabilitas Tak Lancar	X	X
Total Liabilitas	X	X
 NET ASET/EKUITAS		
Modal dari entitas sektor publik lainnya	X	X
Dana cadangan	X	X
Akumulasi surplus/(defisit)	X	X
Kepentingan non-pengendali	X	X
Total net aset/ekuitas	X	X

Gambar 4.2. Contoh Bentuk Neraca

2. Laporan kinerja keuangan. Laporan ini disusun untuk dapat memberikan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan margin/defisit dari pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan organisasi pada satu periode waktu tertentu. Melalui informasi yang disajikan, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi mengenai pemanfaatan dana yang digunakan untuk pelaksanaan aktivitas operasional, serta besaran manfaat/pendapatan yang diperoleh dari pemberian layanan tersebut. Meskipun organisasi sektor publik tidak berfokus dalam mencari margin/keuntungan

dari kegiatan yang dilakukan, namun organisasi tetap memiliki hak pendapatan atas kegiatan pelayanan kepada pengguna layanannya.

	20X2	20X1
PENDAPATAN		
Pendapatan Operasi	X	X
Biaya, denda, penalti, dan lisensi	X	X
Pendapatan dari transaksi pertukaran	X	X
Pendapatan transfer	X	X
Pendapatan lainnya	X	X
Total Pendapatan	X	X
BEBAN		
Beban operasional	X	X
Biaya pendanaan	X	X
Beban lainnya	X	X
Total Beban	X	X
Bagian surplus asosisasi	X	X
Surplus/(defisit)	X	X
Pembagian untuk:	X	X
Pihak pengendali entitas	X	X
Pihak non-pengendali	X	X

Gambar 4.3. Contoh Bentuk Laporan Kinerja Keuangan

3. Laporan Perubahan Ekuitas. Hampir serupa dengan laporan sejenis pada sektor bisnis, Laporan Perubahan Ekuitas pada sektor publik menyajikan informasi mengenai perubahan nilai aset bersih entitas sektor publik pada periode pelaporan. Lebih spesifik laporan ini disusun untuk menyajikan rekonsiliasi saldo awal dan akhir ekuitas, yang terjadi karena adanya penggunaan ataupun penambahan sumber daya pada periode tertentu di suatu entitas sektor publik.

	20X2	20X1
Ekuitas Awal	XXX	XXX
Surplus/Defisit	XXX	XXX
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	XXX	XXX
Koreksi Nilai Persediaan	XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX	XXX
Lain-lain	XXX	XXX
Ekuitas Akhir	XXX	XXX

Gambar 4.4. Contoh Bentuk Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas. Laporan ini menyajikan perubahan pada saldo arus kas di suatu periode pelaporan yang disebabkan oleh adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah kas. Secara umum arus kas diklasifikasikan kedalam tiga kelompok utama, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan.

	20X2	20X1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan operasi	X	X
Penerimaan lainnya	X	X
Arus Kas Keluar		
Biaya operasi	(X)	(X)
Pembayaran lainnya	(X)	(X)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(X)	(X)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pendapatan dari kegiatan investasi	X	X
Pengeluaran untuk kegiatan investasi	(X)	(X)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	X	X
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pendapatan dari dana pinjaman	X	X
Pelunasan dana pinjaman	(X)	(X)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	X	X
Peningkatan/(penurunan) pada kas dan setara kas	X	X
Kas dan setara kas di awal periode	X	X
Kas dan setara kas di akhir periode	X	X

Gambar 4.5. Contoh Bentuk Laporan Arus Kas

5. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berkaitan dengan komparasi antara anggaran yang sudah ditetapkan dengan realisasi penerimaan/penggunaan dari anggaran dimaksud. Komponen yang tersaji dalam laporan ini terdiri dari pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang anggaran.

	Realisasi 20XX	Anggaran 20XX	Selisih Anggaran & Realisasi
Pendapatan			
Biaya, denda, penalti, dan lisensi	X	X	X
Pendapatan dari transaksi pertukaran	X	X	X
Pendapatan transfer	X	X	X
Pendapatan lainnya	X	X	X
Total Pendapatan	X	X	X
Beban			
Beban operasional	(X)	(X)	(X)
Biaya pendanaan	(X)	(X)	(X)
Beban lainnya	(X)	(X)	(X)
Total Beban	(X)	(X)	(X)
Bagian surplus asosisasi	X	X	X
Pembagian untuk:			
Pihak pengendali entitas	X	X	X
Pihak non-pengendali	X	X	X
	X	X	X

Gambar 4.6. Contoh Bentuk Laporan Realisasi Anggaran

6. Catatan atas Laporan Keuangan. Sama dengan bentuk catatan atas laporan keuangan pada laporan entitas lainnya, bentuk laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menjelaskan elemen dan nilai yang telah disajikan pada lima bentuk laporan keuangan diatas. Bentuk laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara lebih detail dari laporan keuangan lain, dapat dalam bentuk penjabaran isi, maksud, definisi, alokasi, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosdini, Dini., Afiah, Nunuy N., Pratama, Arie., & Alfian, Adhi . (2020). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis IPSAS: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- IFAC. (2019). *International Public Sector Accounting Standards Board-HandBook-2019*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Intermediate Accounting*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

BAB 5

SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Yusni

5.1 Pendahuluan

Laporan keuangan sektor publik yaitu representasi kondisi keuangan yang mencakup semua transaksi yang terjadi pada suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang melibatkan pengumpulan serta pengolahan data keuangan. Data ini kemudian ditempatkan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya guna membantu pengguna dalam membuat suatu keputusan. Penyusunan laporan keuangan yang bisa dijelaskan serta diterima secara umum didasarkan pada prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang terkandung pada kerangka akuntansi. Laporan keuangan di sektor publik mencakup: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Aset/Ekuitas Neto, Laporan Arus Kas, serta Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Proses pembuatan laporan keuangan dikenal sebagai siklus akuntansi. Siklus ini meliputi pencatatan sistematis transaksi keuangan, rangkumannya, serta penyusunan laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi adalah proses menyediakan laporan keuangan suatu organisasi untuk suatu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi dibagi menjadi pekerjaan yang dilaksanakan selama suatu periode sebagai akibat dari suatu transaksi ataupun peristiwa. Siklus akuntansi kemudian dimulai dengan menjurnal transaksi dan peristiwa, memindahkannya ke buku besar, serta menghasilkan laporan keuangan di akhir periode.

5.2 Siklus Akuntansi Sektor Publik

Siklus akuntansi adalah pencatatan dan pengikhtisaran sistematis transaksi keuangan untuk pelaporan keuangan. Siklus akuntansi di mulai dengan transaksi yang terdukung oleh bukti, dicatat dalam jurnal, dan diposting ke buku besar utama serta buku besar pembantu. Pengkategorian dalam daftar saldo, dokumen, dan menyesuaikan menghasilkan laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan, serta laporan perubahan modal.

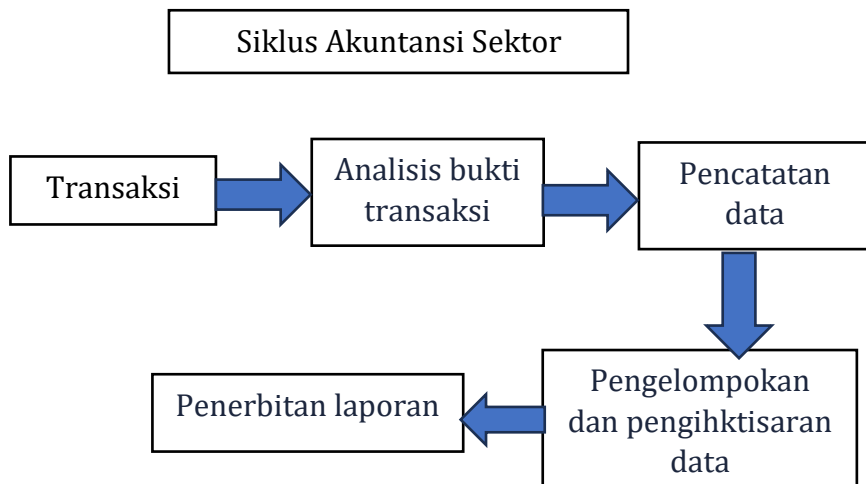
1. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang memuat informasi tentang realisasi pendapatan serta beban suatu entitas dibanding dengan anggarannya. Laporan pelaksanaan anggaran dapat digunakan untuk memperkirakan sumber daya keuangan yang tersedia untuk membiayai kegiatan yang ada. Laporan pelaksanaan anggaran juga menyediakan informasi mengenai kesesuaian penggunaan dana dengan prinsip keuangan, serta efisiensi dan efektivitas anggaran yang disetujui, semuanya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Mahsun, 2015).
2. Laporan Posisi Keuangan/Neraca merupakan laporan keuangan penting yang merangkum aset, kewajiban, serta ekuitas organisasi di suatu waktu. Laporan posisi keuangan yaitu laporan keuangan penting yang memberi informasi penting mengenai status keuangan disuatu organisasi dan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan Keputusan (Lis Setyowati, dkk, (2023)
3. Laporan Arus Kas memberikan gambaran tentang aliran masuk dan keluar uang tunai dalam suatu periode waktu.
4. Laporan Kinerja Keuangan adalah dokumen yang menyajikan pendapatan dan biaya, serta laporan surplus-rugi atau laporan operasi, yang menggambarkan pendapatan serta pengeluaran selama periode tertentu.
5. Laporan Perubahan Modal menunjukkan pengubahan ekuitas pada satu periode akuntansi. Laporan ini mencakup elemen-elemen seperti modal pertama periode, penambahan serta pengurangan diwaktu periode tersebut, serta modal terakhir periode.

6. Catatan atas laporan keuangan sektor publik merupakan bagian integral pada laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos laporan keuangan untuk memastikan pengungkapan yang tepat.

Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik, terdiri pada dua sistem, yaitu dasar kas (*cash basis*), dasar akrual (*accrual basis*), serta akuntansi dana (*fund accounting*)

1. Dasar Kas (*Cash Base*), merupakan Sistem akuntansi dasar kas cuma mencatat arus kas yang masuk dan keluar. Meskipun umumnya digunakan dalam akuntansi bisnis, laporan arus kas juga dapat menjadi tambahan penting di samping laporan pendapatan dan posisi keuangan. Praktik akuntansi arus kas diterapkan pada bermacam organisasi sektor publik serta nirlaba.
2. Dasar Akrual (*Accrual Base*), Penerimaan serta biaya yang diakui (tanpa harus terkait langsung dengan uang yang diterima atau dibayarkan) dapat ditambahkan secara bersama-sama, dianggap valid, dan terkait dengan laporan laba rugi sewaktu periode yang relevan. Pelaksanaan dasar akrual berpengaruh pada sistem akuntansi dengan menambah pos-pos akrual serta formulir pembukuan yang beragam.
3. Akuntansi Dana (*Fund Accounting*), Salah satu opsi dalam sistem akuntansi sektor publik berfokus pada pengelolaan kas dan pengendalian anggaran. Meskipun tidak begitu umum digunakan di sektor swasta, akuntansi dana sangat penting dalam sektor publik karena berdampak langsung pada pengambilan keputusan. Sistem akuntansi dana mengakui transaksi organisasi pada tahap komitmen awal, yaitu ketika pesanan dikirimkan atau diterima, bukan pada saat kas dibayar atau diterima, atau saat faktur diterima atau dikeluarkan.

Siklus Akuntansi Sektor Publik dapat divisualisasikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 5.1. Siklus Akuntansi Sektor Publik
Bastian indra (2010)

5.2.1 Transaksi

Transaksi merujuk pada perjanjian jual beli antara dua pihak, termasuk transaksi diantara organisasi sektor publik dengan pihak lain. Transaksi-transaksi ini merupakan dasar untuk penyusunan laporan keuangan organisasi.

Jenis- jenis Transaksi sebagai berikut:

1. Transaksi kas merujuk pada kegiatan yang menyebabkan perubahan dalam saldo kas, seperti pencairan SPMU, serah terima piutang, pembayaran belanja gaji, dan sebagainya.
2. Transaksi nonkas adalah kegiatan memengaruhi aset, utang, pendapatan, atau belanja tanpa memberikan dampak langsung pada saldo kas, seperti penerimaan aktiva tetap dari donatur atau pembebasan utang.

Pencatat transaksi akuntansi meliputi: Bendahara Rutin yang mengurus belanja pada administrasi umum, operasional, serta pemeliharaan sarana fisik; Bendahara Proyek yang bertanggung jawab atas belanja modal; Bendahara Gaji yang

menangani pengeluaran gaji; dan Bendahara Penerima yang mengurus penerimaan dana.

5.2.2 Analisis Bukti Transaksi

Bukti transaksi merupakan dokumen yang mendokumentasikan setiap transaksi atau peristiwa ekonomi. Contohnya adalah bukti kas seperti surat tanda setoran dan SPM, bukti piutang seperti daftar piutang, bukti persediaan seperti BA penerimaan barang dan daftar persediaan, bukti aktiva tetap seperti BA penerimaan inventaris dan daftar aktiva, bukti utang seperti akad kredit dan dokumen penarikan pinjaman, bukti pendapatan seperti surat tanda setoran dan daftar pembukuan administrasi, serta bukti belanja seperti SPM dan dokumen pembukuan administrasi (DPA). Setiap transaksi harus didukung pada bukti transaksi yang berisi informasi rinci tentang kegiatan transaksi digunakan sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi, yang memungkinkan analisis mendalam sebelum transaksi tersebut diakui dalam sistem akuntansi dana.

5.2.3 Pencatatan data Transaksi atau menjurnal

Setelah melakukan analisis bukti terhadap transaksi maka selanjutnya dilaksanakan pencatatan terhadap transaksi yang sudah terjadi. Pencatatan transaksi dilaksanakan oleh bendahara pada jurnal, yang merupakan metode guna mencatat, mengkategorikan, serta merangkum data keuangan dan sebagainya. Informasi yang disimpan mencakup tanggal transaksi, kode rekening, deskripsi transaksi, serta jumlah debit dan kredit. Bukti jurnal adalah dokumentasi dari bukti transaksi yang digunakan sebagai alat atau media untuk membuat catatan akuntansi. Setiap entri jurnal mengandung kode rekening yang sesuai dengan buku besar, besaran debit dan kredit, serta nama serta tanda tangan atau inisial petugas atau pejabat yang membuat dan memvalidasi bukti transaksi. Bukti jurnal ini menjadi dasar utama untuk melaksanakan pencatatan pada buku jurnal.

Jenis-Jenis Bukti Jurnal:

1. Bukti Jurnal Kas Masuk (BKM) adalah dokumen yang menjadi dukungan pencatatan dalam jurnal untuk

penerimaan kas. Dokumen ini yaitu dokumen transaksi yang disusun oleh petugas kas di unit kerja pemerintah daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti pemotongan/pemungutan pajak dari instansi pusat/negara, kemudian disahkan oleh Bendaharawan Umum Daerah atau Pengelola Keuangan Daerah, kemudian menggunakan BKM sebagai dasar untuk mencatat penerimaan kas ke kas daerah dalam jurnal.

2. Bukti Jurnal Kas Keluar (BKK) adalah dokumen yang digunakan sebagai pendukung untuk pencatatan pengeluaran kas oleh Bendaharawan atau Kas Daerah. Dokumen ini dibuat oleh Petugas kas di unit kerja pemerintah daerah menyusun dokumen transaksi berdasarkan bukti-bukti pengeluaran anggaran, kemudian disetujui oleh Bendaharawan Umum Daerah atau Pengelola Keuangan Daerah. Yang mengelola Keuangan Daerah menggunakan BKK sebagai dasar untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Bukti Jurnal Nonkas atau Memorial (BM) adalah dokumen pendukung pada pencatatan penambahan atau pengurangan padapemasukan, belanja, pembiayaan, aset, utang, atau ekuitas pada suatu entitas.

5.2.4 Pengelompokkan dan pegihktisarkan data

Data yang dicatat dikelompokkan dan diiktisarkan atau diposting ke buku besar yang memuat daftar nama akun yang terdapat di organisasi. Dari nama akun yang tercantum, setiap transaksi direkam dan masuk pembagian disesuaikan dengan akunnnya sendiri, proses ini dikatakan posting. Buku besar adalah catatan yang mencatat semua akun dari jurnal. Buku besar disusun oleh bendahara rutin, bendahara proyek, bendahara gaji, dan bendahara penerima. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat informasi rinci mengenai transaksi yang terkait dengan akun tertentu, seperti piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan utang. Setiap akun memiliki buku besar pembantu sendiri yang memuat detail transaksi secara terperinci. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dengan teliti dan akurat dalam buku besar pembantu

untuk memudahkan pemantauan dan analisis keuangan. Buku besar pembantu kas mencatat detail pemasukan tertentu, seperti pemasukan pajak reklame dan pemasukan retribusi parkir. Buku besar pembantu kas terbagi menjadi dua jenis, yakni buku besar pembantu penerimaan kas serta buku besar pembantu pengeluaran kas.

Pada tahap penghitungan, dilakukan penyusunan pada neraca saldo (*trial balance*) didasarkan akun-akun dalam buku besar, penyusunan ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja atau neraca lajur (*worksheet*), penyusunan ayat jurnal penutup (*closing entries*), serta penyusunan neraca saldo sesudah penutupan. Selain itu, dilakukan juga pembuatan ayat jurnal pembalik.

5.2.5 Penerbitan laporan dan catatannya,

Dalam setiap satu periode akuntansi, setiap transaksi dilakukan pencatatan serta di organisasikan ke pada buku besar, setelah itu berpatokan pada catatan tersebut maka disusunlah laporan keuangan untuk disampaikan dengan pihak-pihak yang punya kepentingan, setelah Menyusun laporan keuangan pada sektor publik selanjutnya dilakukan analisis agar dapat dinilai kebenarannya dan reliabilitasnya. Pada Tahap pelaporan ada dua tahap yaitu pelaporan terhadap unit kerja organisasi dan Laporan konsolidasi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwaji, dkk. 2016. Pengantan Akuntansi. Edisi Kedua. Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Lis Setyowati, Dkk. 2023. Analisis Laporan Keuangan. Purbalingga. Penerbit Cv. Eureka Media Aksara
- Mahsun dan Mohamad. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun, Dkk. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE-Yogyakarta.
- <https://www.scribd.com/document/563981504/Makalah-Siklus-Akuntansi-Dan-Laporan-Kuangan-Sektor-Publik-K-2>

BAB 6

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Oleh Roy Budiharjo

6.1 Pendahuluan

Organisasi dan lembaga publik selalu diminta untuk mengelola biaya sosial dan ekonomi dengan lebih efisien saat melakukan pekerjaan. Akuntansi manajemen sektor publik akan menjadi ilmu untuk mengelola keuangan publik jika tuntutan pertanggungjawaban publik dari berbagai lembaga publik meningkat. Proses yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan menganalisis laporan pengelolaan keuangan di sektor publik tidak sama dengan yang digunakan di sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa ada standar sistem akuntansi yang berbeda dan perbedaan dalam karakteristik sektor publik. Akibatnya, untuk menerapkannya, diperlukan beberapa penyesuaian. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan oleh organisasi sektor publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, universitas, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Tujuan akuntansi manajemen adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan yang terlibat dalam perusahaan melalui pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. Selain itu, akuntansi manajemen berguna untuk membuat strategi dan rencana jangka panjang.

Informasi yang diperoleh dari akuntansi manajemen sangat penting untuk pengambilan keputusan organisasi. Masa depan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kebutuhan informasi akuntansi manajemen. Indonesian public service sector juga memperhatikan informasi akuntansi manajemen sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi, sehubungan dengan kebutuhan organisasi

akan data akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sektor publik didefinisikan sebagai informasi akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan yang ditujukan kepada pemimpin untuk perencanaan dan pengendalian (Mardiasmo, 2011).

Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta (Bastian, 2010). Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang diperlukan. Hal ini juga berdampak pada keputusan manajemen organisasi yang lebih mengutamakan kebijakan yang dibuat oleh atasan daripada informasi akuntansi internal. Akuntansi manajemen di sektor publik dapat membantu pengambilan keputusan manajemen jangka pendek.

6.2 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Istilah "manajemen sektor publik" sudah biasa di dunia akuntansi. Reformasi pelayanan publik dan reformasi akuntansi sektor publik sangat memengaruhi manajemen sektor publik. Ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep akuntansi manajemen sektor publik. Pengertian akuntansi manajemen sektor publik menggabungkan pengertian sektor publik dan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen, menurut Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi digunakan dengan benar dan sesuai.

Selain itu, menurut *Statements on Management Accounting 1A: The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources*. Akuntansi manajemen adalah pekerjaan yang melibatkan pengambilan keputusan manajemen, pembuatan rencana dan sistem

manajemen kinerja, penyediaan keahlian pelaporan keuangan, dan pengendalian untuk membantu manajemen membuat dan menerapkan strategi perusahaan.

Sektor publik adalah organisasi yang kompleks dan beragam yang didefinisikan dari sudut pandang ilmu ekonomi sebagai suatu entitas yang beroperasi untuk menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Karena kompleksitas sektor publik, kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih beragam. Selain itu, pihak yang terlibat dalam sektor publik membutuhkan informasi yang lebih beragam, dapat diandalkan, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Pemenuhan hak publik termasuk pelayanan publik dan barang publik. Selain itu, "sektor publik" merujuk pada organisasi publik, terutama pemerintah, yang menggunakan dana publik untuk mencapai kesejahteraan umum. Akibatnya, akuntan sektor publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi untuk organisasi internal dan eksternal.

Akuntansi manajemen sektor publik dipahami sebagai cara untuk menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan yang ditujukan kepada pemimpin sektor publik untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan strategik, pemberian informasi, penilaian investasi dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, dan penilaian kinerja adalah semua bagian dari perencanaan. Pengendalian didefinisikan sebagai pengukuran pencapaian kinerja manajemen melalui pencapaian target yang sesuai dengan program yang telah direncanakan (Sujarweni, 2015). Tujuan perencanaan dan pengendalian ini akan digunakan sebagai pengukur untuk menerapkan akuntansi manajemen sektor publik.

6.3 Aktivitas Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Manajemen sektor publik melakukan banyak hal yang mirip dengan organisasi swasta, seperti perencanaan, koordinasi berbagai divisi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan

organisasi, dan fungsi pengendalian. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki tiga tugas dalam pelaksanaannya.

1. Dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan, partisipasi dalam proses perencanaan mencakup tingkat strategis dan operasional. Contoh partisipasi dalam proses perencanaan termasuk penyusunan kebijakan, pembuatan rencana, dan penyusunan konsep dasar penganggaran yang diwakili dalam satuan uang.
2. Proses pengambilan keputusan termasuk penentuan, analisis, presentasi, dan interpretasi informasi yang relevan.
3. kontribusi pada proses pengawasan dan kontrol kinerja. pemberian laporan berkala untuk organisasi secara keseluruhan dan segmennya yang ada. Laporan ini juga mencakup perbandingan antara pencapaian target dan realisasi anggaran.

6.4 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Dalam manajemen organisasi sektor publik, akuntansi sangat penting. Akuntansi manajemen memberikan informasi tentang tujuan laporan keuangan dan berbagai jenisnya. Untuk mengelola semua sumber daya perusahaan, akuntansi manajemen sektor publik digunakan. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan harus dicapai melalui akuntansi manajemen sektor publik.

Untuk mencapai tujuan organisasi, seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengendalian, informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian. Dalam organisasi sektor publik, akuntansi manajemen berfungsi untuk merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, menilai investasi, menganggarkan, menentukan tarif dan biaya pelayanan, dan menilai kinerja.

1. Perencanaan Strategi

Pada langkah perencanaan strategi, manajemen menawarkan dan mengembangkan alternatif inisiatif untuk mendukung strategi perusahaan. Peran akuntansi manajemen adalah untuk menentukan biaya program (*cost of program*) dan biaya aktivitas (*cost of activity*) sehingga

berdasarkan informasi akuntansi tersebut dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk sumber daya yang dimiliki. Akuntansi manajemen harus akurat, relevan, dan handal untuk menjamin alokasi sumber daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Pemberian Informasi Biaya

Pada tahap pemberian informasi biaya, informasi akuntansi manajemen harus dapat menemukan tempat pemborosan yang masih dapat diefisiensikan dan menemukan cara terbaik untuk mengurangi biaya. Untuk menemukan biaya yang terjadi, akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran strategis dalam perencanaan finansial. Dalam akuntansi manajemen sektor publik, pengambilan keputusan biaya memerlukan accounting biaya.

Sektor publik menggunakan akuntansi biaya untuk mengumpulkan data tentang pengeluaran publik untuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Diharapkan bahwa informasi akuntansi manajemen akan membantu dalam menentukan dan melaporkan biaya dengan mengklasifikasikan biaya; ini termasuk biaya apa pun yang termasuk dalam kategori biaya rutin (biaya rutin) dan biaya modal (biaya modal), kontrolable dan uncontrollable, tetap dan variabel, dan lainnya.

3. Penilaian Investasi

Pada fase penilaian investasi ini, kelayakan investasi dinilai secara ekonomi dan finansial. Untuk menilai investasi, akuntansi manajemen diperlukan karena untuk menilai investasi diperlukan untuk mengidentifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan investasi. Tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian (termasuk risiko negara dan risiko politik), dan sumber dana untuk investasi harus diperhatikan oleh akuntan manajemen. Analisis efektifitas biaya, juga dikenal sebagai analisis efektivitas biaya, adalah metode penilaian investasi yang menekankan dampak (hasil) yang dicapai oleh suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu. Analisis ini dapat digunakan untuk memudahkan.

4. Penganggaran

Akuntansi manajemen sektor publik diharapkan dapat membantu membuat anggaran publik yang lebih efektif terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilitas. Akibatnya, akuntansi manajemen berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mendistribusikan sumber daya publik secara tepat, efektif, adil, dan merata kepada masyarakat.

5. Penentuan Biaya Pelayanan dan Tarif Pelayanan

Akuntansi manajemen digunakan pada tahap penentuan biaya dan tarif pelayanan untuk menentukan berapa biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada penerima layanan publik, termasuk perhitungan subsidi.

Perbaikan sistem akuntansi manajemen sektor publik diperlukan karena keluhan masyarakat tentang biaya pelayanan yang tinggi dan tuntutan agar pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus berorientasi pada pelayanan publik dan mendengarkan keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat. Ini akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Biaya pelayanan dan tarif, atau biaya pelayanan, membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah daerah harus dapat menghitung biaya yang diperlukan untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, aman, dan nyaman, serta biaya operasionalnya. Kemudian, mereka dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan tarif pelayanan yang akan dikenakan pada pengguna jasa terminal atau stasiun kereta api tersebut. Perusahaan air minum milik pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi semua biaya yang terjadi di bisnis sehingga dapat menetapkan harga per meter kubik kepada pelanggan dan mengurangi kerugian perusahaan dengan menggunakan informasi biaya tersebut. Inefisiensi dapat ditemukan dan dihilangkan dengan informasi akuntansi manajemen.

6. Penilaian Kinerja

Akuntansi manajemen bertanggung jawab untuk membuat indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan pada tahap penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

6.5 Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Sistem yang mengelola manajemen sektor publik sangat terkait dengan akuntansi manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan mereka dan mencegah kesalahan. Sudah jelas bahwa kegagalan ini dapat disebabkan oleh fungsi manajemen itu sendiri yang tidak berjalan sesuai dengan standar. Beberapa kelompok di Indonesia menggunakan pengendalian manajemen sektor publik ini, diantaranya:

1. Pengendalian Preventif

Sebelum proses manajemen dimulai, pengendalian dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan jangka pendek. Perencanaan yang cermat akan sangat membantu perusahaan menjalankan operasi dengan tingkat kesalahan yang rendah, yang tentu saja berdampak pada efisiensi dan produktivitas.

2. Pengendalian Operasional

Pengendalian ini adalah periode di mana manajemen mengawasi operasi organisasi, seperti program kerja yang berjalan. Anggaran yang dibuat pada awal tahun kerja untuk setiap program kerja adalah alat pengawasan untuk pengendalian ini. Budget ini akan berfungsi sebagai alat yang menghubungkan perencanaan dan pengendalian.

3. Pengendalian Kinerja

Setelah program kerja selesai atau organisasi mencapai tahun akhir kerja, manajemen melakukan penilaian kinerja untuk menilai program kerja dan kinerja karyawan. Untuk menilai kinerja tahun sebelumnya, evaluasi dapat dilakukan dengan melihat apa yang telah dicapai pada setiap program kerja yang sudah direncanakan dari awal, atau dengan membandingkan kinerja tahun sebelumnya sebagai standar.

Karena perencanaan dan pengendalian pada dasarnya adalah satu dan sama, keduanya harus dipertimbangkan secara bersamaan. Karena tidak ada tindak lanjut (*follow-up*) untuk mengetahui apakah rencana organisasi telah dicapai, perencanaan tidak berarti tanpa pengendalian. Sebaliknya, tanpa perencanaan, tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian adalah siklus proses yang membuat satu tahap berhubungan satu sama lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones dan Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial untuk organisasi sektor publik menjadi lima langkah: (1) Perencanaan tujuan dan sasaran dasar; (2) Perencanaan operasional; (3) Penganggaran; (4) Pengendalian dan pengukuran; dan (5) Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

Menurut Jones dan Pendlebury (1996), berikut adalah contoh proses pengendalian manajerial dan perencanaan dalam organisasi sektor publik.



Gambar 6.1. Proses Perencanaan Dan Pengendalian Manajerial

Sumber: Jones, R. dan Pendlebury, M. (1996) Accounting for the Public Sector.

6.6 Tujuan Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen dan meningkatkan akuntabilitas internal yang berdampak pada masyarakat bukan tujuan utama akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik diatur oleh pemerintah dengan tiga tujuan, yaitu:

1. Mengatur persyaratan untuk pengawasan keuangan pemerintah.
2. Mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas politik.
3. Menggunakan sumber daya negara dengan efisien.

Selain itu, tujuan akuntansi manajemen sektor publik adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik melalui penyediaan data. Ketiga komponen tersebut memiliki dampak yang signifikan pada perusahaan sektor publik. Oleh karena itu, seluruh

kegiatan perusahaan sektor publik dapat diawasi dengan baik dengan akuntansi manajemen.

6.7 Peranan Teknologi Dalam Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Kehidupan masyarakat telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Setiap organisasi, baik profit maupun nonprofit, merasa perlu menerapkan teknologi di lingkungan kerja karena tuntutan efisiensi waktu dan biaya. Dalam kebanyakan kasus, penggunaan teknologi dalam sistem informasi organisasi memiliki variasi sebagai berikut:

1. Mengurangi tingkat risiko;
2. Mengurangi pengeluaran;
3. Meningkatkan nilai;
4. Membangun realitas baru

Sudah jelas bahwa teknologi dapat membantu dalam penerapan akuntansi manajemen di sektor publik. Sektor publik menggunakan sistem akuntansi. Masyarakat selalu menuntut transparansi pengelolaan keuangan lembaga publik. Akuntansi sektor publik berfokus pada dua hal. Pertama, itu tentang karakteristik lembaga. Oleh karena itu, karakteristik akuntansi ini hanya berlaku untuk organisasi nonprofit yang tidak menghasilkan keuntungan, seperti lembaga pemerintahan. Kedua, akuntansi sektor publik berkonsentrasi pada tujuan lembaga. Seperti namanya, akuntansi sektor publik hanya menyediakan data tentang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

World Bank menyatakan bahwa interaksi antara warga negara atau pelaku usaha dengan lembaga pemerintahan terus meningkat seiring dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Menurut definisi World Bank, e-government (disingkat eGov) mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga atau lembaga pemerintahan untuk mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan tugas mereka.

Meskipun E-Gov berfokus pada tiga aspek penting berikut interaksi antara pemerintah dengan warganya (*Government to Citizens—G2C*), interaksi antara pemerintah dengan bisnis (*Government to Business—G2B*), dan interaksi antara lembaga pemerintahan dan pemerintah sendiri (*Government to Government—G2G*). Namun, beberapa pengamat menambahkan aspek keempat, yaitu interaksi antara pemerintah dengan karyawannya (*Government to Employees—G2E*).

1. Interaksi Antara Pemerintah dan Warga (*Government to Citizen-G2C*)

Salah satu tujuan utama E-Gov adalah sektor ini, yang memungkinkan pemerintah berinteraksi dengan rakyatnya. Beberapa contoh interaksi ini termasuk (1) perizinan dan sertifikasi yang diperbarui, (2) pembayaran pajak, dan (3) akses ke informasi publik.

2. Interaksi Antara Pemerintah dan Pelaku Bisnis (*Government to Bussiness-G2B*)

Sektor ini sangat penting karena dorongan bisnis untuk mengurangi biaya melalui praktik pengadaan yang lebih baik dan kompetisi. Beberapa teknik pembelian terkait dengan hal berikut:

- a. Pembayaran kepada pihak kontraktor berdasarkan hasil pekerjaan dikenal sebagai kontrak berbasis kinerja.
- b. Pembayaran di muka kepada pihak kontraktor, seperti memasang sistem komputer yang baru, dilakukan melalui pembagian dalam kontrak penyimpanan.
- c. Pelelangan balik adalah cara pelelangan secara kompetitif untuk melakukan penawaran dan permintaan untuk mencapai kesepakatan harga.

3. Interaksi Antara Lembaga Pemerintahan (*Government to Government-G2G*)

Sektor ini lebih menunjukkan kekuatan e-Gov karena kebutuhan komunikasi antara pemerintah nasional, provinsi, dan daerah.

4. Interaksi Antara Pemerintah dan Pegawai (*Government to Employee-G2E*)

Sektor ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan pemerintah. Salah satu implementasi G2E adalah (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pengembangan karir pegawai pemerintah; (2) pengelolaan berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai; dan (3) sistem asuransi kesehatan dan pendidikan, serta tabungan dan dana pensiun.

Pada dasarnya, tujuan dari E-Government adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui layanan yang tersedia secara online. Sebenarnya hampir sama dengan etalase yang menampilkan data statistik, potensi wisata, indeks prestasi pemerintah, dan sumber daya daerah di situs web pemerintahan resmi. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah terhadap pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Chartered Institute of Management Accountant. (1994). *Management Accounting: Path Ways to Progress*. London: Chartered Institute of Management Accountant.
- Effendy. (2017). *Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. <https://dosenakuntansi.com/pengertian-akuntansi-manajemen-sektor-publik>
- Effendy. (2017). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. <https://dosenakuntansi.com/sistem-pengendalian-manajemen-sektor-publik>
- Gie. (2020). *Pengertian Akuntansi Sektor Publik, Karakteristik, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya*. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-akuntansi-sektor-publik/>
- Indra Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga. Jogjakarta.
- Jones, R., Pendlebury, M. (1996). *Public Sector Accounting. Fourth*. London: Pitman Publishing.
- Juwita, R., Tanjung, R., Sundari, R. (2018). Implementasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik terhadap Penetapan Target Pendapatan di Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekspansi*, 10, 1, 29-41.
- Mardiasmo, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Andy Offset, Jogjakarta.
- Sari, R. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. <https://risnisariakt.wordpress.com/2017/07/29/akuntansi-manajemen-sektor-publik/>
- Sinaga, J. (2017). Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 4, 2, 164-178.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press

BAB 7

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Oleh Ismawati

7.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) sector publik merupakan serangkaian mekanisme yang dirancang untuk membantu organisasi publik mencapai tujuannya. SPM membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, operasi organisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Tujuan dan sasaran organisasi tercapai, serta akuntabilitas kepada publik terpenuhi. SPM sektor publik memiliki beberapa karakteristik utama yaitu berfokus pada penyediaan layanan berfokus pada penyediaan layanan publik yang berkualitas, mempertimbangkan kepentingan publik, terkait dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada publik.(Anthony and David W. Raiborn, 2016)

Tujuan utama SPM sektor publik adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas dan transparansi organisasi publik, kualitas layanan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

1. Perencanaan: Proses penetapan tujuan dan sasaran organisasi.
2. Penganggaran: Proses mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
3. Pelaporan: Proses penyediaan informasi tentang kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Pengawasan: Proses memantau kinerja organisasi dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Tabel 7.1. Perbedaan SPM Sektor Publik dan Swasta

Aspek	SPM Sektor Publik	SPM Sektor Swasta
Tujuan	Menyediakan layanan publik yang berkualitas	Menimbulkan laba
Pemilik	Masyarakat	Pemegang saham
Akuntabilitas	Kepada publik	Kepada pemegang saham
Peraturan	Terikat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Lebih fleksibel dalam aturan dan regulasi
Pengukuran Kinerja	Fokus pada indikator kinerja yang terkait dengan layanan publik	Fokus pada indikator kinerja keuangan
Transparansi	Diwajibkan untuk transparan dalam operasinya	Tingkat transparansi bervariasi tergantung pada jenis perusahaan

Sumber: Merchant and Stede (2014)

Contoh penerapan SPM Sektor Publik di Indonesia

1. Bidang Pendidikan

- Penerapan Kurikulum Merdeka: Memberikan keleluasaan sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik.
- Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Membantu sekolah dalam membiayai operasional dan meningkatkan mutu pendidikan.
- Program Guru Penggerak: Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pembelajaran di sekolah melalui pelatihan dan pendampingan.

2. Bidang Kesehatan
 - a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
 - b. Program Pencegahan Stunting: Menurunkan angka stunting melalui edukasi dan pemberian gizi seimbang kepada anak balita. Pembangunan Fasilitas Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil.
3. Bidang Infrastruktur
 - a. Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan: Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Penyediaan Air Minum Bersih dan Sanitasi: Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup.
 - c. Program Perumahan Rakyat: Membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak.
4. Bidang Pelayanan Publik
 - a. Pelayanan Perizinan Terpadu Berusaha (PTSP): Mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha.
 - b. Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil): Menyediakan layanan dokumen kependudukan yang mudah diakses.
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online: Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara online.
5. Bidang Pengentasan Kemiskinan:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.
 - b. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS): Memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
 - c. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT): Memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

7.2 Konsep Dasar Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Sistem pengendalian manajemen sektor publik merupakan suatu aktifitas pengendalian organisasi dalam membuat strategi organisasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat 7 aktivitas dalam pengendalian manajemen di sektor publik :

1. Perencanaan
Pada tahapan perencanaan suatu organisasi menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, menggambarkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan menyusun rencana yang detail serta terjadwal
2. Koordinasi
Tahapan Koordinasi yaitu menyelaraskan kegiatan dan sumber daya antar unit organisasi, memastikan komunikasi yang efektif antar pihak terkait, dan mencegah duplikasi dan pemborosan.
3. Komunikasi
Tahap Komunikasi Informasi dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan serta menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu pada pengambilan keputusan
4. Pengambilan keputusan
Pada Tahapan pengambilan keputusan suatu organisasi mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dan memberikan analisis resiko dan alternatif solusi
5. Motivasi
Pimpinan organisasi berupaya meningkatkan motivasi kinerja karyawan dan menciptakan budaya kerja yang positif dan suportif.
6. Pengendalian
Memantau kinerja organisasi terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi masalah yang terjadi
7. Penilaian Kinerja

7.3 Tipe Pengendalian Manajemen

Tipe pengendalian manajemen menurut (Hood, 2011) dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pengendalian preventif
pada tahap ini pengendalian manajemen berkaitan dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program.
2. Pengendalian operasional
Tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dan pengendalian
3. Pengendalian kinerja
Tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan

7.4 Struktur Pengendalian Manajemen

Struktur pengendalian manajemen (SPM) merupakan elemen-elemen yang membentuk sistem pengendalian manajemen yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban. Struktur ini dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif, serta meningkatkan akuntabilitas kepada publik. (Bhimani and A. Barry, 2017) Elemen-elemen struktur pengendalian manajemen sebagai berikut:

1. Pusat Biaya
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasinya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Satu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan bukan nilai output yang dihasilkan.
2. Pusat Pendapatan
Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan
3. Pusat Laba

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan

4. Pusat Investasi

Pusat Investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

7.5 Proses Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Siklus SPM sektor publik merupakan rangkaian tahapan yang berkelanjutan dan saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik. (Lapsley and Walker, 2018)

7.5.1 Tahapan Proses Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

1. Penetapan Tujuan dan Strategi:

Tahap ini merupakan titik awal dari siklus SPM. Pimpinan organisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, harus menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound). Visi, misi, tujuan, dan sasaran ini harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki batas waktu yang jelas. Penetapan tujuan dan strategi harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal organisasi, seperti sumber daya yang tersedia, kondisi ekonomi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan organisasi harus mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi kepada seluruh anggota organisasi agar semua pihak memahami dan berkomitmen untuk mencapainya.

2. Penyusunan Anggaran

Tahap ini berfokus pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat perkiraan kebutuhan sumber daya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam tahap penetapan tujuan dan strategi. RKA harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan unit kerja terkait. Penyusunan RKA harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. RKA harus disetujui oleh pimpinan organisasi sebelum dilaksanakan.

3. Pelaksanaan Anggaran

Tahap ini merupakan tahap implementasi RKA. Unit kerja pelaksana harus melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan kinerja, maka perlu dilakukan tindakan korektif dan preventif.

4. Pelaporan Kinerja:

Tahap ini berfokus pada penyusunan laporan kinerja yang memuat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja harus disusun secara akurat, objektif, dan mudah dipahami. Laporan kinerja harus disampaikan kepada pimpinan organisasi secara berkala. Pimpinan organisasi harus menganalisis laporan kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan mengidentifikasi potensi masalah.

5. Pengendalian Kinerja:

Tahap ini merupakan tahap di mana pimpinan organisasi melakukan pengendalian terhadap kinerja organisasi. Pimpinan organisasi harus membandingkan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan kinerja, maka perlu dilakukan tindakan korektif dan preventif. Tindakan korektif dan preventif harus dilakukan secara sistematis dan terukur.

6. Penilaian Kinerja:

Tahap ini merupakan tahap di mana pihak independen melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan

efektivitas SPM secara keseluruhan. Pihak independen dapat berupa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor eksternal. Penilaian kinerja harus dilakukan secara objektif dan akuntabel. Hasil penilaian kinerja harus digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan SPM di masa depan.

7.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Siklus SPM

Efektivitas siklus pada sistem pengendalian manajemen disektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Komitmen pimpinan organisasi: Pimpinan organisasi harus berkomitmen untuk menerapkan SPM secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Keterlibatan pemangku kepentingan: Semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan dalam proses SPM, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
3. Kualitas data dan informasi: Data dan informasi yang digunakan dalam SPM harus akurat, lengkap, dan terkini.
4. Kompetensi sumber daya manusia: Sumber daya manusia yang terlibat dalam SPM harus memiliki kompetensi yang memadai.
5. Sistem dan prosedur yang efektif: Sistem dan prosedur yang digunakan dalam SPM harus efektif dan efisien.

7.5.3 Manfaat Penerapan Siklus SPM yang Efektif:

1. Meningkatkan pencapaian tujuan organisasi.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7.6 Tantangan dan Isu dalam Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) sektor publik di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa

tantangan dan isu yang kompleks. Berikut beberapa poin penting:

1. Kurangnya Budaya Akuntabilitas dan Transparansi

Masih banyak pejabat publik yang belum memahami makna akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh. Budaya "asal-jadi" dan "tidak mau bertanggung jawab" masih marak di lingkungan organisasi sektor publik. Kurangnya sistem dan mekanisme yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut:

- a. Memperkuat komitmen pimpinan: Pimpinan organisasi harus memberikan contoh dan teladan dalam menerapkan budaya akuntabilitas dan transparansi.
- b. Membangun sistem pelaporan yang transparan: Sistem pelaporan keuangan dan kinerja harus dibuat transparan dan mudah diakses oleh publik.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan SPM.
- d. Menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran: Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- e. Melakukan edukasi dan pelatihan: Memberikan edukasi dan pelatihan kepada seluruh anggota organisasi tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi.

2. Lemahnya Sistem Pengukuran Kinerja:

Belum ada standar pengukuran kinerja yang jelas dan terukur untuk semua unit kerja di sektor publik. Sistem pengukuran kinerja yang ada seringkali tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Kurangnya data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengukuran kinerja. Lemahnya pengukuran kinerja dapat diatasi dengan hal berikut:

- a. Mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan terukur: Indikator kinerja harus ditetapkan dengan jelas dan terukur, serta sesuai dengan tujuan organisasi.

- b. Membangun sistem pengumpulan data yang akurat: Sistem pengumpulan data yang akurat dan terstruktur harus dibangun untuk mendukung pengukuran kinerja.
- c. Menggunakan teknologi informasi: Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja.
- d. Melakukan evaluasi berkala: Evaluasi berkala terhadap sistem pengukuran kinerja harus dilakukan untuk memastikan keefektifannya.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengendalian manajemen di sektor publik. Anggaran yang dialokasikan untuk implementasi SPM masih terbatas. Kurangnya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengendalian manajemen. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan yaitu:

- a. Meningkatkan anggaran untuk SPM: Anggaran yang dialokasikan untuk implementasi SPM perlu ditingkatkan untuk mendukung pengadaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.
- b. Merekrut dan melatih SDM yang kompeten: Melakukan rekrutmen dan pelatihan SDM yang kompeten di bidang pengendalian manajemen dan sistem informasi.
- c. Memanfaatkan kerjasama antar instansi: Kerjasama antar instansi pemerintah dapat dilakukan untuk saling berbagi sumber daya manusia dan keuangan.
- d. Mendorong partisipasi sektor swasta: Sektor swasta dapat dilibatkan dalam membantu penyediaan sumber daya manusia dan keuangan untuk implementasi SPM.

4. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Pemerintah

Kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah dalam implementasi SPM. Belum ada sistem yang jelas untuk mengelola dan memantau pelaksanaan SPM di seluruh sektor publik. Kurangnya komunikasi dan informasi

antar instansi pemerintah terkait dengan SPM. Hal tersebut dapat diatasi dengan:

- a. Membentuk tim koordinasi SPM: Tim koordinasi SPM perlu dibentuk untuk memastikan koordinasi antar instansi pemerintah dalam implementasi SPM.
- b. Membuat standar dan pedoman SPM: Standar dan pedoman SPM yang seragam perlu dibuat untuk memastikan keseragaman dalam implementasi SPM di seluruh sektor publik.
- c. Melakukan komunikasi dan sosialisasi: Komunikasi dan sosialisasi tentang SPM perlu dilakukan secara berkala kepada seluruh instansi pemerintah.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi: Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

5. Intervensi Politik

Intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan SPM dapat mengganggu efektivitas dan akuntabilitas organisasi sektor publik. Kepentingan politik terkadang mendominasi daripada kepentingan publik dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Kurangnya independensi organisasi sektor publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut:

- a. Memperkuat independensi organisasi: Independensi organisasi sektor publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu diperkuat.
- b. Membuat aturan yang jelas tentang intervensi politik: Aturan yang jelas tentang intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan SPM perlu dibuat.
- c. Meningkatkan peran masyarakat sipil: Masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi dan mengontrol intervensi politik dalam SPM.
- d. Mendorong reformasi birokrasi: Reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik.

7.7 Penutup

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) sektor publik merupakan instrumen penting bagi organisasi sektor publik untuk mencapai tujuannya dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Penerapan SPM yang efektif dapat membantu organisasi sektor publik:

1. Meningkatkan pencapaian tujuan organisasi: Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, serta memantau dan mengevaluasi pencapaiannya secara berkala, organisasi sektor publik dapat memastikan bahwa mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya: SPM membantu organisasi sektor publik untuk menggunakan sumber dayanya secara lebih efisien dan efektif, sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: SPM membantu organisasi sektor publik untuk lebih transparan dan akuntabel kepada publik dengan menyediakan informasi tentang kinerja dan penggunaan sumber daya publik.
4. Meningkatkan kepercayaan publik: Penerapan SPM yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi sektor publik, sehingga masyarakat lebih yakin untuk memanfaatkan pelayanan publik yang disediakan.

Meskipun penerapan SPM sektor publik di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu, namun dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, penerapan SPM dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N. and David W. Raiborn (2016) *Management control systems*. 15th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Bhimani and A. Barry (2017) *Management control systems for public sector organizations*. Routledge. New York.
- Hood, C. (2011) 'A stream of management research for public service organizations: Accounting, performance measurement and control', *Journal of Public Administration*, 50(4), pp. 455–469.
- Lapsley, R. and Walker, D. T. (2018) *Public sector accounting and financial management: A Canadian perspective*. 6th ed. Toronto: Pearson Canada.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terb. Edited by Mardiasmo. Yogyakarta: ANDI.
- Merchant, K. A. and Stede, W. a vander (2014) *Sistem Pengendalian Manajemen Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Insentif*. Salemba Empat.

BAB 8

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Oleh Sarsiti

8.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan konsep garis anggaran untuk penjualan dua (2) barang atau lebih (Basuki, 2019). Anggaran yang dibuat secara langsung mengaitkan semua tindakan yang akan dilakukan dan secara langsung mengaitkan seluruh unit dan bagian. Oleh karena itu, sebelum membuat anggaran, sangat disarankan untuk memberikan penjelasan tentang arah dan tujuan perusahaan agar masing-masing dapat membuat rencana aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut.

Anggaran pemerintah adalah dokumen formal dari hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan kegiatan pemerintah beserta kegiatan lain yang mendukungnya (PP Nomor 71 Tahun 2010). Anggaran berisi rencana mengenai pendapatan, pembiayaan, belanja dan transfer yang tersusun secara sistematis untuk jangka waktu tertentu dan diukur dalam satuan rupiah.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Sedangkan anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan dana publik. Anggaran memberi informasi mengenai rencana organisasi untuk masa depan dan bentuk anggrana sektor publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang berisis mengenai pendapatan, belanja, dan pengeluaran.

Anggaran berfungsi sangat penting yaitu sebagai alat pengendalian manajemen (Mahmudi, 2016). *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) menyatakan anggaran sebagai rencana operasi keuangan meliputi estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Haruman, 2010).

8.2 Manfaat Anggaran

Menurut Agustino, Leo. (2014) ada beberapa manfaat dari penggunaan anggaran untuk bisnis, yaitu:

1. Menghasilkan rencana terintegrasi artinya seluruh rencana kegiatan akan berhubungan satu dengan yang lain karena kegiatan-kegiatan yang bersangkutan membutuhkan biaya, dengan demikian dalam menyusun anggaran harus menyangkut seluruh kegiatan perusahaan.
2. Memberikan arahan tentang cara melaksanakan kegiatan
Ada alat pengawasan yang baik untuk membandingkan cara menghitung penilaian realisasi (evaluasi) hasil kegiatan perusahaan di masa depan.
3. Ada alat untuk menilai kegiatan perusahaan.
4. Perusahaan yang memiliki anggaran untuk kegiatan operasional dapat melakukan penilaian rutin setelah menyelesaikannya

Selain memberi manfaat anggaran juga memiliki beberapa kekurangan (Nafarin, 2004) yaitu;

1. Penyusunan anggaran menggunakan asumsi dan taksiran sehingga merupakan hal yang belum pasti;
2. Penyusunan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang banyak maka tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara akurat dan lengkap;
3. Pelaksanaan anggaran menjadi kurang efektif jika pihak-pihak merasa terpaksa untuk melaksanakan anggaran tersebut.

Siska, Adila juita & Nono Afriyanto, (2018) membuktikan bahwa anggaran dapat dijadikan alat untuk mengukur prestasi serta bisa dikoordinasikan, dihubungkan dan diintergrasikan ke rencana operasional organisasi sehingga target akan terlaksana secara efektif dan efisien. Anggaran bisa sebagai alat pengali manajemen untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

8.3 Fungsi anggaran

Beberapa fungsi anggaran menurut Mardiasmo (2018:78-83), antara lain:

8.3.1 Alat perencanaan

Anggaran difungsikan sebagai rencana tindakan apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi serta digunakan untuk jumlah biaya dan hasilnya apa dari belanja ini, artinya bahwa anggaran dapat difungsikan sebagai penentu tujuan, serta sasaran kebijakan yang sesuai visi dan misi dari pemerintah dan anggaran bisa merencanakan berbagai program serta kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi beserta alternatif pembiayaannya. Anggaran akan digunakan untuk pengalokasian dana untuk berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Anggaran akan digunakan untuk sebagai penentu indikator kinerja dan strategi yang akan dicapai.

8.3.2 Alat pengendalian

Anggaran berfungsi sebagai pengontrol untuk mencegah pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan, pengeluaran yang terlalu rendah, atau pengeluaran yang terlalu banyak. Anggaran sektor publik berfungsi sebagai kontrol manajemen untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Anggaran juga digunakan untuk memantau keadaan keuangan dan pelaksanaan inisiatif atau program pemerintah. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengawasi anggaran sektor publik:

1. Dibandingkan antara anggaran dengan realisasi,

2. Membandingkan selisih anggaran,
3. ada alasan untuk ketika ada selisih antara yang dapat diperbaiki dan tidak dapat diperbaiki dan
4. melakukan perubahan terhadap target dan standar biaya untuk tahun berikutnya.

8.3.3 Alat kebijakan fiskal

Anggaran sektor publik membantu membuat prediksi dan estimasi ekonomi karena membantu mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah dan menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

8.3.4 Alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik yang berfungsi sebagai kesepakatan legislatif dan komitmen eksekutif untuk menggunakan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran akan digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang diperlukan serta prioritas apa yang harus dilakukan. Manajer publik membutuhkan keterampilan negosiasi yang baik, kemampuan untuk membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan keahlian manajemen keuangan sektor publik. Anggaran bukan hanya masalah teknik. Akibatnya, kegagalan anggaran dapat menjatuhkan pemerintahan dan reputasinya.

8.3.5 Alat koordinasi dan komunikasi

Dengan menggunakan dokumen anggaran yang lengkap, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. Seluruh bagian pemerintah dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan bantuan anggaran.

8.3.6 Alat penilaian kinerja

Bagaimana kinerja eksekutif dinilai melalui pencapaian target anggaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja manajer publik saat ini didasarkan pada

pencapaian hasil yang sesuai dengan anggaran. Penganggaran sangat penting untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja.

8.3.7 Alat Motivasi

Anggaran bias menjadi sarana untuk mendorong manajer dan karyawan mereka agar mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Namun, anggaran harus menantang agar bisa memotivasi karyawan.

8.3.8. Alat menciptakan ruang publik

Partisipasi organisasi nonpemerintah (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan) adalah penting dalam proses penganggaran publik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran bisa melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung. Partisipasi aktif dapat dilihat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (daerah) dan pembangunan. Di sisi lain, keterlibatan secara tidak langsung bisa terwujud melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Fungsi anggaran Sektor Publik yang disajikan oleh Mardiasmo ini juga sama dengan halnya menurut Sujarweni, et al. (2015, h.31).

8.4 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran dilihat dari jenis pengeluaran, dapat dibedakan menjadi dua (2) (Mardiasmo, 2018), yaitu:

8.4.1 Anggaran Operasional

Pengeluaran ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemerintahan. Pengeluaran reguler adalah jenis pengeluaran yang dimasukkan ke dalam anggaran operasional pemerintah. Pengeluaran ini bermanfaat untuk satu tahun anggaran saja dan tidak bisa menambah aset atau kekayaan pemerintah. Pengeluaran ini pengeluaran yang terjadi setiap tahun beberapa kali, karena itulah disebut sebagai rutin.

8.4.2 Anggaran Modal

Rencana anggaran ini mencakup alokasi dana untuk aktiva tetap seperti bangunan, peralatan, kendaraan, dan perabotan di masa yang akan datang. Biasanya pinjaman digunakan untuk investasi modal yang besar. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran. Hal ini akan meningkatkan aset atau kekayaan negara dan selanjutnya memperbesar anggaran operasi dan pemeliharaan.

Sistem perencanaan anggaran publik menurut Mahmudi, (2016) ada beberapa pendekatan tersebut, antara lain:

1. *Line Item Budget*

Sistem anggaran line item budget menampilkan biaya berdasarkan masukan atau sumber daya yang dipakai. Sistem ini berfokus pada masukan dan menunjukkan biaya yang lebih rendah, tetapi tidak dapat melaporkan pelaksanaan anggaran karena tidak ada hubungan antara input dan output. Kelemahan sistem line item budget adalah bahwa mereka lebih terfokus pada keputusan tentang masukan daripada mengukuhkan uang. Item line budget memiliki banyak keuntungan, seperti mudah digunakan dan mudah dikelola, cukup untuk mengontrol input, membantu dalam perencanaan, dan memenuhi prioritas.

2. *Incremental Budget*

Sistem anggaran yang disebut incremental adalah sistem anggaran yang hanya menaikkan atau menurunkan anggaran sesuai data anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar perencanaan tahun ini, atau sebagai dasar perencanaan tahun mendatang. Logika sistem ini adalah keseimbangan bertahap, operasi sehari-hari, dan kelangsungan bisnis. Keunggulan dari sistem incremental budget adalah sesuai untuk penganggaran kegiatan sehari-hari dan yang sedang berlangsung seperti administrasi kantor, pemeliharaan dan pekerjaan organisasi umum. Kelemahan sistem incremental budget adalah anggaran tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar anggaran, dan anggaran tersebut seringkali berlipat ganda.

3. *Planning, Programming, Budgeting System* (PPBS)

Sistem yang mana anggaran yang penentuan jumlah anggaran disesuaikan dengan suatu rencana disebut *planning, programming, budgeting system* (PPBS), juga dikenal sebagai *programme budgeting*. Anggaran yang diperlukan untuk setiap program disesuaikan dengan rencana aksi PPBS. PPBS terdiri dari dua bagian utama. Struktur program terdiri dari kerangka konseptual yang menghubungkan sumber daya, program, dan kegiatan dengan tujuan. Perangkat lunak analisis mengawasi analisis manfaat biaya dan alokasi anggaran untuk setiap program.

4. *Zero Based Budget* (ZBB)

Penganggaran berbasis nol (ZBB) adalah sistem penganggaran yang membuat anggaran baru untuk setiap anggaran sehingga dapat dimulai dari nol. Kelebihan dari penganggaran berbasis nol adalah bahwa itu dapat mengurangi anggaran yang mubazir dan terbuang percuma karena anggaran didasarkan pada kebutuhan nyata dan bukan program yang berulang. Sulit untuk mengatur dan menjalankan kelemahan ZBB. Rencana dan kegiatan bisnis mungkin tidak baru dan tidak perlu dimulai dari awal.

5. *Performance Budget*

Anggaran kinerja, juga dikenal sebagai anggaran berbasis kerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengatur hubungan antara input (anggaran) dan hasil yang diharapkan (output) dari kegiatan dan program, serta dampak yang dihasilkan dari pencapaian keluaran dan hasil.

Sistem perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan akibat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Adhi Kuncoro, Abdul Hakim & Mochmamad Makmur, 2019). Setelah dijadikan Undang-Undang pada tahun 2003, sistem keuangan negara terus diperbaiki setelah disahkan menjadi hukum. Dalam hal perencanaan, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berperan sebagai panduan

bagi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia untuk menerapkan proses perencanaan.

Menurut Mardiasmo (2002), ada dua pendekatan yang berbeda yang digunakan oleh berbagai negara untuk perencanaan dan penganggaran sektor publik. Pendekatan manajemen sektor publik yang baru berfokus pada kinerja, atau penganggaran berbasis kinerja. Anggaran konvensional masih digunakan di negara-negara berkembang, meskipun negara-negara maju telah meninggalkannya. Salah satu karakteristik utama anggaran tradisional adalah bahwa anggaran disusun dengan pendekatan *incrementalism* dan memiliki struktur yang berfokus pada *line item*.

Struktur anggaran tradisional tidak mampu menyajikan secara spesifik jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. disamping itu, struktur tersebut tidak mampu menjelaskan rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Diharapkan bahwa pendekatan kinerja akan mengatasi kekurangan penganggaran konvensional, yang seringkali tidak memiliki standar untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan dan sasaran. Metode ini tidak hanya fokus pada konsep uang dan pengawasan output kinerja, tetapi juga menekankan pada menetapkan prioritas tujuan dan menggunakan metode pengambilan keputusan yang terstruktur dan rasional.

Anggaran kinerja berorientasi pada tujuan dan sasaran kinerja, sehingga anggaran yang dialokasikan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dan menilai kinerja berdasarkan efektifitas penggunaan anggaran dan *value for money* (Mardiasmo (2002).

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang lebih mempertimbangkan pencapaian hasil, kinerja, atau output daripada biaya atau input yang telah dialokasikan melalui mekanisme perencanaan. Anggaran berbasis kinerja sangat menghargai pencapaian hasil kinerja secara efisien, ekonomis, dan efektif. Kinerja output harus dipantau dan dialokasikan sesuai dengan tujuan serta memprioritaskan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran bagi Kementerian Negara atau Lembaga, terdapat tiga komponen utama yang diperlukan oleh pemerintah untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja:

1. Indikator Kinerja.

Dalam mengevaluasi keberhasilan suatu program atau kegiatan, indikator kinerja dapat berupa indikator kinerja utama pada tingkat program. Indikator kinerja kegiatan pada tingkat kegiatan, dan indikator keluaran pada level subkegiatan.

2. Standar Biaya

Standar biaya terdiri dari standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan standar biaya khusus yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga. Biaya dapat dimanfaatkan saat proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Standar biaya adalah perkiraan biaya dan patokan teratas untuk menyelesaikan kegiatan.

3. Penilaian Kinerja.

Evaluasi kinerja dapat membantu dalam menilai dan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan serta memberikan masukan tentang seberapa efektif dan efisien program atau kegiatan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian suatu strategi dengan menggunakan ukuran finansial dan non finansial. Tujuan dari pengukuran tersebut bertujuan adalah untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kemampuan dalam mengalokasikan sumber daya, meningkatkan tanggung jawab publik, serta meningkatkan komunikasi didalam kelembagaan. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa dalam menentukan indikator kinerja perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Sistem perencanaan serta pengendalian yang diterapkan
2. Spesifikasi teknis dan pengendalian
3. Keahlian teknis serta profesionalisme
4. Mekanisme yang berkaitan dengan ekonomi dan pasar

5. Cara kerja sumber daya manusia.

Indikator kinerja dapat memainkan peran penting di berbagai aspek dalam organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2009), seperti:

1. Membantu menguraikan tujuan organisasi
2. Membantu dalam mengevaluasi pencapaian target akhir
3. Membantu dalam penyusunan insentif bagi manajer
4. Memberikan kesempatan kepada pengguna layanan publik untuk membuat pilihan mereka sendiri
5. Menunjukkan tingkat kinerja yang diharapkan.
6. Menunjukkan efektifitas
7. Membantu dalam menentukan pengakrualan.

Beberapa lembaga sektor publik menggunakan berbagai indikator kinerja sesuai dengan jenis layanan dan kontribusi mereka kepada masyarakat.

8.5 Siklus Anggaran Sektor Publik

Siklus anggaran sektor Publik adalah rentang waktu mulai dari penyusunan anggaran hingga pengesahan anggaran oleh undang-undang. Menurut Mardiasmo (2018:87-89), siklus anggaran terdiri dari empat tahap yaitu:

8.5.1 Persiapan Anggaran

Saat melakukan persiapan anggaran, pengeluaran dihitung dengan cara mengalikan pendapatan yang tersedia. Sebelum menyetujui perkiraan pengeluaran, penting untuk melakukan perkiraan pendapatan yang lebih akurat. Ketika membuat keputusan tentang anggaran pengeluaran, penting untuk diingat bahwa estimasi anggaran pendapatan juga dapat menimbulkan masalah yang cukup berbahaya.

8.5.2 Ratifikasi Anggaran

Saat ini, kepala eksekutif harus mampu memberi jawaban dan alasan yang masuk akal terhadap segala pertanyaan dan kritik dari lembaga legislatif.

8.5.3 Pelaksanaan Anggaran

Saat ini, sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen sangat krusial bagi manajer keuangan publik. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem akuntansi yang memadai dan dapat dipercaya untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang sudah disepakati, serta untuk tahap penyusunan anggaran.

8.5.4 Laporan dan Penilaian

Pada saat ini, masalah akuntabilitas berkaitan dengan anggaran. Apabila pelaksanaan dijalankan dengan dukungan sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang baik, maka tidak akan terjadi kendala pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran.

8.6 Pendekatan Penyusunan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2011:63), ada tiga cara pendekatan untuk membuat anggaran, yaitu:

8.6.1 Pendekatan dari atas ke bawah (*Top down approach*)

Mengacu pada pendekatan yang dimulai dari tingkat tertinggi atau yang paling umum kemudian turun ke tingkat yang lebih spesifik. Dalam penentuan anggaran ini, manajemen senior menetapkan anggaran untuk tingkat yang lebih rendah, sehingga pelaksana hanya bisa melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan. Karena kurangnya komitmen dari pembuat anggaran, metode ini jarang berhasil dan dapat membahayakan keberhasilan rencana anggaran.

8.6.2 Pendekatan dari bawah ke atas (*Bottom up approach*)

Mengacu pada pendekatan yang dimulai dari detail atau komponen terkecil kemudian dipadukan menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Pendekatan bottom-up melibatkan pembuatan anggaran oleh staff tingkat rendah, yang kemudian diserahkan untuk disetujui oleh pimpinan. Pendekatan ini, manajer tingkat bawah terlibat dalam proses pembuatan anggaran. Pendekatan bottom-up dapat mendorong karyawan untuk berkomitmen mencapai target anggaran, tetapi harus diawasi dengan cermat

agar jumlahnya sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

8.6.3 Kombinasi top down dan bottom up.

Salah satu dari dua pendekatan ini sangat efektif karena menekankan pentingnya kerja sama antara atasan dan bawahan dalam menetapkan anggaran terbaik untuk bisnis.

8.6 Prinsip-prinsip anggaran Publik

Menurut Mardiasmo (2018:83), prinsip anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persetujuan dari badan Legislatif.
Pengeluaran publik harus mendapatkan persetujuan dari badan legislatif sebelum bisa dilaksanakan oleh badan eksekutif.
2. Lengkap.
Anggaran harus mencakup semua pengeluaran dan penerimaan pemerintah, sehingga dana di luar anggaran pada dasarnya bertentangan dengan prinsip anggaran yang komprehensif.
3. Integritas anggaran.
4. Pemanfaatan yang tidak membeda-bedakan
Dana yang disetujui oleh lembaga legislatif harus dimanfaatkan secara hemat, produktif, dan efisien.
5. Teratur.
Pembuatan anggaran bisa dilakukan setiap tahun atau dalam rentang waktu beberapa tahun.
6. Tepat.
Estimasi anggaran tidak boleh mencakup cadangan yang terlihat atau tersembunyi. Ini bisa menjadi penyebab pemborosan dan ketidakefisienan dalam pengeluaran anggaran, serta dapat mengakibatkan perkiraan pendapatan yang terlalu rendah dan perkiraan pengeluaran yang terlalu tinggi.
7. Jelas
Anggaran haruslah mudah dimengerti, simpel dan tidak menimbulkan kebingungan.

8. Diterbitkan.

Pengumuman anggaran harus dilakukan kepada masyarakat.

Sedangkan Menurut Indra Bastian (2010:193), prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Demokratis artinya ada kebutuhan akan partisipasi dalam penetapan anggaran pendapatan dan pengeluaran yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta dibahas dan disetujui oleh badan legislatif.
2. Adil berarti bahwa anggaran negara harus didistribusikan secara proporsional ke semua kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka dan diprioritaskan untuk kepentingan umum.
3. Transparansi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak hanya oleh wakil rakyat tetapi juga oleh publik secara menyeluruh
4. Menjalankan keuangan negara dengan etika dan moral yang tinggi serta patuh pada hukum adalah tanda dari kepemimpinan yang bermoral tinggi dalam pengelolaan anggaran negara.
5. Berhati-hati karena sumber daya yang terbatas dan mahal, anggaran negara juga harus dikelola dengan hati-hati. Ini menjadi sangat penting saat hubungan dengan utang organisasi.
6. Akuntabel berarti bahwa manajemen keuangan organisasi harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

8.7 Karakteristik anggaran sektor public

Menurut Indra Bastian (2010:81), salah satu karakteristik dari anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Anggaran disajikan dalam bentuk keuangan dan satuan non-keuangan.
2. Biasanya anggaran mencakup periode waktu yang spesifik, seringkali berlangsung selama satu atau beberapa tahun.

3. Anggaran adalah ekspresi dari komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai tujuan.
4. Usulan anggaran akan diperiksa dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi dari mereka yang menyusun anggaran.
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah sesuai dengan persyaratan khusus..

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kuncoro, Abdul Hakim & Mochmamad Makmur, 2019).
Proses Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada
Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Jurnal Profit|
Volume.13 No. 1 2019. pp 47-62.
- Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta:
Bandung
- Afriyanto, (2015). Metode CAMEL untuk menilai tingkat
kesehatan PD. BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian. Jurnal
ilmiah Cano ekonomi, 4 (2), pp 67-74.
- Asmawati dan Basuki. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan
Keuangan, 2(1), 63-76.
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar
Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi
Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi empat.
Jakarta: Salemba Empat.
- Harnoko, Muhammad Nuralif. 2018. Pengaruh Partisipasi
Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran
Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat
Daerah Kota Palembang. Skripsi. Politeknik Negeri
Sriwijaya
- Haruman, Tendi, 2010. *National Committee on Governmental
Accounting (NCGA)*: Jakarta.
- Hasanah dan Suartana. 2014. Pengaruh Interaksi Motivasi Dan
Budaya Organisasi Pada Hubungan Antara Partisipasi
Penyusunan Anggaran dengan Senjangan Anggaran. E-
Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- M. Nafarin, 2004, "Penganggaran Perusahaan ", Salemba Empat,
Jakarta.
- Mahmudi. (2016). Buku Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII
Press Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Penerbit Andi Yogyakarta

- Mardiasmo, 2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Siska, Adila juita & Nono Afriyanto, (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*. Vol. 2 , No. 1, Januari-Juni 2018.
- Sujarweni, V.W. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Pustaka Press.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB 9

ANALISIS INVESTASI PUBLIK

Oleh Rizky Maharani Rustam

9.1 Pendahuluan

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas kinerja finansial pemerintah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Perkembangan sektor publik menuntut adanya pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik mempunyai pengaruh besar pada kebijakan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh organisasi dan kebijakan terhadap perorangan seperti menilai syarat infrastruktur fisik dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi maupun kebijakan industri.

Sektor publik merupakan entitas atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik. Entitas ini mencakup pemerintah pusat dan pemerintah lokal, organisasi yang memelihara infrastruktur sebagai pelayanan publik yang bertanggungjawab kepada legislatif, badan-badan publik yang didanai terutama dari pajak, badan-badan usaha publik yang sebagian besar diatur, dimiliki atau dikendalikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Badan-badan politik *nondepartment*, partai politik, yayasan, koperasi, badan-badan amal dan lainnya.

Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yaitu investasi dalam bentuk pembangunan di

daerah atau pusat, khususnya yang merupakan hasil pembangunan yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, investasi publik ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Investasi publik memiliki keterkaitan erat dengan penganggaran modal atau investasi sebagai proses untuk menganalisis proyek dan untuk menganalisis proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif perlu dilakukan analisis investasi publik secara mendalam. (Mardiasmo, 2018).

Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik juga terkait dengan 2 (dua) kegiatan yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. (Arifin, 2017)

9.2 Program Investasi Publik

Analisis investasi publik berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan sektor publik. Maka dari itu dibutuhkan pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Secara umum anggaran terdiri dari anggaran perusahaan, anggaran negara, anggaran daerah, atau anggaran lembaga lainnya yang dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode masa yang akan datang. Anggaran bagi sektor publik meliputi anggaran bagi sebuah negara, suatu daerah otonom atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau akan lebih mudah disebut dengan anggaran publik. Makna anggaran publik adalah suatu kebijakan publik tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode dimasa depan serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi dimasa yang lalu. (Arifin, 2017)

Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi

prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek.

Program investasi publik merupakan betuk dari *dual budgeting* yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, di antaranya, yaitu memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. (Muwarni, 2011)

Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, perlu menentukan kebutuhan investasi maka dilakukan evaluasi yang mencakup (1) inventarisasi investasi, (2) inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk, (3) cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada, (4) tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang, (5) inventarisasi kebutuhan investasi, (6) evaluasi kelayakan investasi, (7) kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penghitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya: *Pay Back period*, *Cost Benefit Analysis*, and *Cost Effectiveness Analysis*.

9.3 Penentuan Kebutuhan Investasi Publik

Tujuan investasi publik ditinjau dari PP No. 1 Tahun 2008 menjelaskan terdapat dua dari tujuan investasi pemerintah yaitu memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum. PP No. 1 Tahun 2008 menjelaskan sumber dana dari investasi pemerintah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keuntungan investasi terdahulu, dana atau barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah. Investasi publik ditujukan sebagai bentuk pelayanan Pemerintah kepada publik.

Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. (Yuesti, 2020)

Terdapat beberapa cara dalam menggolongkan usul investasi yaitu menggolongkan investasi berdasarkan investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi baru.

9.3.1 Investasi Penggantian

Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis.

9.3.2 Investasi Penambahan Kapasitas

Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang ada saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara *input* dengan *output* yang

dihasilkan. Jika suatu barang modal sudah kurang atau tidak efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas.

9.3.3 Investasi Baru

Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya untuk ntuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.

9.4 Aspek Kelayakan Investasi

Aspek kelayakan investasi perlu dipertimbangkan untuk melihat manfaat dari pelaksanaan investasi tersebut. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. (Yuesti, 2020)

Aspek-aspek kelayakan investasi yang perlu dipertimbangkan antara lain, yaitu:

9.4.1 Aspek Teknik

Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak atau tidak di terima.

9.4.2 Aspek Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan.

Untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan.

9.4.3 Aspek Ekonomi dan Finansial

Aspek finansial menerangkan pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan, berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas dan likuiditas perlu dipertimbangkan. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan.

9.4.4 Aspek Distribusi

Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi, yaitu dari mana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari *public revenue* atau oleh individu, apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak, apakah proyek dijalankan oleh *public agencies* atau oleh individu. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik.

9.5 Faktor Investasi Publik

Analisis mengenai suatu investasi tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Di negara berkembang seperti Indonesia masih belum semudah di negara maju dalam hal investasi atau penanaman modal, baik di pandang dari prosedur pembelian, jenis surat berharga maupun mekanisme transaksi dalam melakukan investasi. Secara teori ada beberapa

jenis investasi yang dapat dipilih berupa saham (*stock*) dan obligasi (*bond*).

Saham merupakan bukti penyertaan modal disuatu perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Berdasarkan klasifikasinya, saham dapat dibedakan berdasar hak pemegang sahamnya, yakni saham biasa, saham preferen dan atau saham saham preferen kumulatif, dan saham istimewa. Selain ketiga jenis saham tersebut dikenal pula saham pendiri dan saham bonus. Saham pendiri adalah saham diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa-jasa para pendiri dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan. Sedangkan Saham Bonus adaiah saham biasa yang diberikan kepada pemegang saham yang telah ada tanpa adanya penyeteran. Saham bonus diberikan sebagai ganti hak menagih kepada perseroan atas dana cadangan atau dana kelebihan dari modal yang ditempatkan. (Arifin, 2017)

Salah satu upaya untuk mendapatkan dana selain dengan saham dapat pula dengan menerbitkan obligasi. Pendanaan dengan obligasi tidak terbatas pada pemerintah pusat tetapi juga dikeluarkan oleh daerah atau badan-badan pemerintah seperti BUMN atau BUMD. Yang diharapkan dari obligasi ini adalah suntikan dana segar untuk menambah dana pembangunan. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Ciri obligasi antara lain kreditur yang banyak dan tersebar, debitur (penerbit) obligasi yaitu suatu badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas, negara, provinsi atau unit-unit dibawahnya yang lebih kecil seperti Kabupaten atau Kotamadya. Berdasarkan jenis pihak yang menerbitkannya (debitur) ini, obligasi dapat dikelompokkan menjadi obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah.

Investasi publik tidak hanya dapat berupa saham atau obligasi saja namun dapat berupa lainnya seperti asuransi bernilai tunai maupun sertifikat biro keuangan. Berinvestasi dapat dilakukan dengan banyak pilihan atau tempat yang dapat digunakan dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Terkait dengan investasi publik, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis investasi publik, yaitu (Mardiasmo, 2018):

9.5.1 Tingkat Diskonto yang Digunakan

Tingkat diskonto yang digunakan merefleksikan tingkat keuntungan (*rate of return*) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (*required rate of return*), maka proyek tersebut harus ditolak atau tidak diterima.

Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Untuk memberikan kemudahan pemahaman mengenai konsep ini, terlebih dahulu akan dijelaskan praktik yang dilakukan di sektor swasta. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (*equity finance*) dan pembiayaan utang (*debt finance*). Keuntungan yang diperoleh para kreditor sebagai pemberi utang, berupa pembayaran bunga utang, sedangkan investor memperoleh keuntungan berupa deviden dan *gain* atas saham yang dimilikinya. Harga pasar saham merefleksikan laba dimasa depan yang diharapkan (*expected future earnings*). Pembiayaan utang mempunyai risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal sehingga kreditor akan meminta tingkat kembalian (*rate of return*) yang lebih rendah dibandingkan dengan investor karena risiko investasi berbanding lurus dengan *return* investasi. Semakin tinggi risiko investasi, maka *return* yang diharapkan juga semakin tinggi. Di samping itu pembiayaan utang memiliki biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan modal. Biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri (*cost of equity*) karena pembayaran bunga utang merupakan biaya yang mengurangi pajak.

Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan rumus:

$$K_0 = K_e \cdot (E/V) + K_d \cdot (1-T) \cdot (D/V)$$

Dalam hal ini:

K_0 = biaya modal total

K_e = biaya modal (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi modal)

K_d = biaya utang (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi utang)

T = Tingkat pajak

E = Harga pasar saham

D = harga pasar surat berharga utang

$V = E + D$ = nilai pasar perusahaan secara keseluruhan

Berdasarkan asumsi bahwa seluruh biaya dan manfaat suatu proyek telah dinilai cukup, masalah berikutnya yang perlu dipertimbangkan berfokus pada tingkat diskonto (*discount rate*) yang cocok yang akan digunakan. Biaya dan manfaat terjadi pada titik waktu yang berbeda, sehingga nilai tersebut perlu didiskontokan untuk beberapa periode waktu sebelum berbagai alternatif investasi diperbandingkan untuk ditentukan investasi mana yang akan dilakukan. Untuk tujuan analisis biaya manfaat, maka perlu digunakan tingkat diskonto sosial (*social discount rate*).

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan *social discount rate* sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut *social time preference rate* (STPR).

Kemungkinan lebih lanjut adalah mencoba untuk menjelaskan *social opportunity cost rate* (SOCR). Penggunaan analisis berdasarkan SOCR adalah bahwa sumber daya yang digunakan untuk melakukan investasi di sektor publik terbatas dan sumber daya itu tidak tersedia untuk digunakan di tempat lain. Di sini diasumsikan bahwa investasi di sektor swasta (*private sector*) tidak akan dilakukan, sehingga tingkat kembalian investasi yang dapat dihasilkan disektor swasta merefleksi *opportunity cost* investasi sektor publik. Kesulitan yang muncul adalah dalam menentukan *rate of return* di sektor swasta. *Rate of returns* pada investasi sektor swasta merefleksikan risiko keuangan dan risiko bisnis perusahaan swasta. *Social discount rate* didasarkan pada *rate of returns* pada hutang pemerintah. Satu pemecahan untuk membatasi *social*

discount rate adalah dengan menggunakan proses pendiskontoan, artinya biaya dan manfaat diharapkan berubah pada tingkat kembalian investasi yang sama sebagai perubahan dalam kebutuhan tingkat harga-harga umum (*general price levels*). Hal ini merupakan pendekatan yang diadopsi pada investasi sektor publik harus dinilai dengan pengujian *social discount rate*. (Muwarni, 2011)

9.5.2 Tingkat Inflasi

Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (*expected future returns*) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan.

Inflasi yang tinggi menyebabkan *required rate of return* semakin tinggi. (Yuesti, 2020)

9.5.3 Risiko dan Ketidakpastian

Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi (Yuanita, 2023).

Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara (*country risk*) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori *default country*. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya *property right* dan *contract right* dapat menurunkan risiko investasi. Untuk itulah, dengan terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi dapat menurunkan risiko investasi.

9.5.4 Penjatahan Modal

Penjatahan modal (*capital rationing*) merupakan keadaan ketika suatu organisasi menghadapi masalah ketersediaan dan untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini perlu adanya alternatif investasi yang dilakukan agar tetap memiliki persediaan dana untuk

membiayai investasi-investasi yang diajukan (Arifin, 2017). Oleh karena itu harus dilakukan perangkingan investasi. Perankingan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan rasio manfaat atau biaya atau dapat juga menggunakan program linier.

Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor diatas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tingkat utang pemerintah
2. Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (*social opportunity cost rate*)
3. *Social time preference rate*

Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan diluar pajak, seperti utang luar negeri dan obligasi pemerintah yaitu berupa bunga dan pokok utang. *Social opportunity cost rate* terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan (*return*) yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama. Atau dengan kata lain, dengan jumlah investasi yang sama, proyek investasi publik yang dilakukan pemerintah harus memiliki kualitas yang minimal sama jika proyek tersebut dilakukan oleh swasta. Sedangkan *social time preference rate* merefleksikan tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan. (Muwarni, 2011)

9.6 Teknik Penilaian Investasi Publik

Investasi dalam sektor publik harus mendapat perhatian lebih karena keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan (Mardiasmo, 2018).

Analisis investasi sektor publik difokuskan pada evaluasi terhadap biaya-manfaat suatu proyek atau investasi/belanja modal, dimana syarat utama dalam menganalisis dan mengevaluasi penilaian atas besarnya biaya dan manfaat, serta

memperkirakan waktu atau umum investasi yang dimaksudkan, namun kuantifikasi biaya dan manfaat di sektor publik tidaklah mudah karena biaya dan manfaat tidak hanya aspek hasil komersial dari suatu investasi, tetapi juga aspek sosial, budaya, keamanan, dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan manajemen sektor publik, termasuk perkembangan otonomi daerah, maka konsep-konsep sektor privat banyak diaplikasikan di sektor publik. Oleh sebab itu, analisis investasi di sektor publik dilakukan dengan pendekatan di sektor privat, namun dilengkapi hal-hal yang dianggap penting untuk analisis investasi (Yuanita, 2023).

(Mardiasmo, 2018) Prinsip penilaian investasi sangat sederhana, terdapat 4 (empat) langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu:

9.6.1 Identifikasi Kebutuhan Investasi yang Mungkin Dilakukan

Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Identifikasi alternatif-alternatif diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antar proyek perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi yang lain.

9.6.2 Menentukan Semua Manfaat dan Biaya dari Proyek yang akan Dilaksanakan (*cost / benefit relationship*)

Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik- teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan.

9.6.3 Menghitung Manfaat dan Biaya dalam Rupiah

Menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah terkadang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat

diukur dalam bentuk rupiah. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya (*cost effectiveness analysis*).

9.6.4 Memilih Proyek Yang Memiliki Manfaat Terbesar Dan Efektivitas Biaya Yang Tinggi

Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan, bahkan beberapa diantaranya tidak dapat dipakai dalam pengukuran yang objektif dalam bentuk moneter. Analisis moneter mungkin mengindikasikan bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik, tetapi faktor-faktor politik, respon pemerintah, serta tekanan-tekanan sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas proyek tersebut. Dapat menggunakan analisis moneter yang mungkin mengindikasi bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik.

Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode yaitu: (1) metode penilaian investasi tradisional, dan (2) metode aliran kas yang didiskontokan (*discounted cash flow*). Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan (*accounting rate of return on capital employed-ROCE*) dan *payback period* (PP). ROCE secara sederhana dirumuskan, sebagai berikut:

$$\text{Laba} \div \text{Jumlah modal yang diinvestasikan} = \text{akuntansi}$$

Informasi mengenai laba akuntansi diperoleh dari laporan laba rugi sebuah organisasi, sedangkan informasi modal dapat diketahui dari neraca. Terdapat 2 (dua) masalah dalam menggunakan metode ROCE ini. Pertama, perhitungan angka akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual dan memasukkan item-item bukan kas, seperti depresiasi dan

cadangan kerugian piutang. Kedua, ROCE hanya mengukur periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang (*time value of money*).

Metode penilaian investasi dengan menggunakan *discounted cash flow* misalnya adalah *net present value* (NPV) dan *internal rate of return* (IRR). NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas dimasa datang (*future cash flow*) dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal (*opportunity cost of capital*). NPV diperoleh dengan cara pengurangan pengeluaran investasi awal dengan aliran kas di masa depan yang di-*present value*-kan. Proyek yang memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima dan proyek yang nilai NPV-nya negatif adalah proyek yang harus ditolak.

Internal rate of return mendiskontokan *future cash flow* pada tingkat *net present value* yang bernilai nol atau nihil, atau dengan kata lain adalah ukuran yang menyetarakan aliran kas bersih di masa datang (*future net cash flow*) dengan pengeluaran investasi awal. IRR dinyatakan dalam persentase, proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah proyek yang potensial untuk diterima. Untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat menggunakan alat analisis yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, misalnya NPV, IRR, *payback period*, dan sebagainya.

Ada beberapa metode perhitungan kriteria investasi yang dapat digunakan untuk menetapkan layak atau tidak layaknya suatu proyek dilakukan, yaitu:

1. Net Present Value (NPV)

Net present value adalah kriteria investasi yang banyak digunakan dalam mengukur apakah suatu proyek *feasible* atau tidak. Perhitungan *net present value* merupakan *net benefit* yang telah didiskon dengan menggunakan *Social Opportunity Cost of Capital* (SOCC) sebagai *discount factor*.

Untuk menghitung NPV di dalam sebuah gagasan usaha atau proyek, diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan.

2. Internal Rate of Return (IRR)

Internal rate of return adalah suatu tingkat *discount rate* yang menghasilkan net present value sama dengan 0(nol). Dengan demikian apabila hasil perhitungan IRR lebih besar dari *Social Cost of Capital* (SOCC) dikatakan proyek tersebut *feasible*, bila sama dengan SOCC berarti peluang pokok dan dibawah SOCC proyek tersebut tidak *feasible*. IRR ini menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang dapat dicapainya.

3. **Payback Period**

Payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. *Payback period* dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{Payback Period} = \frac{\text{investasi awal}}{\text{keuntungan tahunan}}$$

Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana sehingga banyak digunakan, tetapi *payback period* mengandung kelemahan, yakni *payback period* mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi yang diperoleh setelah *payback period* tercapai, mengabaikan nilai waktu uang dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat *mutually exclusive*.

Maka dari itu, analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apakah proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak dilihat dari segi finansial maupun non finansial. Usulan investasi harus memperhatikan kemampuan anggaran dan kelayakan investasi. Kelayakan investasi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek kelayakan teknis, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan finansial, serta aspek distribusi.

Untuk menganalisis investasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan Teknik yang bisa digunakan pada sektor swasta. Metode evaluasi investasi yang bisa digunakan adalah metode *Net Present Value*, *Internal Rate of Return*, analisis *Payback Period*, dan sebagainya. Hal-hal lain yang harus

diperhatikan adalah tingkat diskonto yang harus digunakan, tingkat inflasi, risiko dan ketidakpastian, serta *capital rationing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Halim Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI
- Muwarni, Ani Sri. 2011. Analisis Investasi pada Sektor Publik. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 14(1), 39-51. <https://doi.org/10.35591/wahana.v14i1.48>
- Presiden Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah*.
- Yuanita, Dielanova dkk. 2023. Kinerja dan Investasi Sektor Publik sebagai Bentuk Pelayanan Daerah: Sebuah Telaah Pustaka. *JIAK: Jurnal Ilmiah dan Akuntansi Keuangan*, 12(1), 23-33. ISSN: 2580-510X/P-ISSN:2548-9453 <http://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jiak/index>
- Yuesti, Anik dkk. 2020. *Akuntansi Sekotr Publik*. Bali: CV. Noah Aletheia

BAB 10

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Oleh Dewi Mustika Ratu

10.1 Pendahuluan

Sektor publik seperti pemerintah memegang peran penting dalam menentukan berjalannya kehidupan masyarakat dengan baik. Hal ini membuat pengelolaan di sektor ini menjadi tugas yang penting dan rumit. Kompleksitas masalah pada “*Big Government*” bukan hanya terbatas pada ukuran dan perannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi (aktivitas dan fungsi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah), namun juga mencakup aspek kinerjanya (bagaimana ketercapaian pemerintah dalam menjalankan fungsinya).

Pengukuran kinerja dalam sektor publik jauh lebih rumit dibandingkan pada sektor privat/bisnis. Bagi sektor privat dengan tujuannya mencari laba, kinerja difokuskan dan diukur pada manfaat bagi perusahaan, misalnya menggunakan tingkat profitabilitas, solvabilitas, maupun likuiditas sehingga lebih mudah dalam pengukurannya. Di satu sisi, tujuan organisasi sektor publik adalah menyediakan layanan yang berkualitas, ketersediaan kebutuhan publik, dan optimalisasi sumber daya. Hal ini membuat pengukuran kinerja yang fokusnya pada pemberian manfaat kepada publik menjadi abstrak dan kompleks.

Sebagai contoh, untuk mengukur kualitas pendidikan secara akurat, maka indikatornya tidak hanya diukur dari nilai ujian siswa, tetapi juga dari faktor lain seperti kompetensi guru, jumlah lulusan, dan infrastruktur sekolah. Selain itu, pengukuran juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal misalnya aksesibilitas layanan bagi berbagai kelompok masyarakat dengan kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu,

pengukuran kinerja di sektor publik harus mempertimbangkan keragaman ini untuk memastikan bahwa semua pengguna layanan terlayani dengan baik.

10.2 Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Istilah “kinerja” bersifat kompleks dan multiperspektif. Kinerja adalah tentang hasil kerja yang dicapai dari aktivitas tertentu dari input yang diproses menjadi output. Adapun dalam sektor publik, kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kinerja adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Bastian, 2001)”.

Dari definisi tersebut, kinerja direpresentasikan sebagai tingkat ketercapaian pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam organisasi. Lebih jauh, kinerja dapat dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai publik dan berkaitan juga dengan prinsip 3E dalam tata kelola sektor publik, yakni ekonomi, efisiensi, efektivitas.

Manajemen kinerja berkaitan dengan pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Pengukuran kinerja berkaitan dengan penentuan, estimasi, dan penilaian terhadap informasi tertentu yang berhubungan dengan kinerja yang direncanakan atau dicapai.

Pengukuran kinerja dipahami sebagai penilaian indikator yang nantinya bermanfaat dalam pengambilan keputusan lingkungan sektor publik. Pengukuran kinerja juga berhubungan dengan pemantauan aktivitas sehingga pada akhirnya akan menghasilkan perilaku yang diinginkan dan mendorong adanya peningkatan kinerja, karena esensi dari pengukuran kinerja adalah adanya perbaikan (Bandy, 2023).

Pengukuran kinerja dapat dilihat sebagai cara untuk menggunakan hasil temuan untuk berbagai tujuan dalam organisasi sektor publik, seperti perencanaan hingga

pengendalian. Varians antara apa yang ditetapkan dalam indikator kinerja dan realisasinya menjadi alat penting dalam manajemen kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian, pengukuran kinerja merupakan media yang merepresentasikan kemajuan organisasi karena tidak mungkin suatu organisasi dapat bertindak efektif tanpa mengukur kinerjanya.

Pengukuran kinerja dipandang sebagai hal fundamental dalam pelayanan publik karena berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Pengukuran seperti ini dapat menunjukkan misalnya kepada rakyat sebagai wajib pajak mengenai layanan dan fasilitas apa yang sudah dinikmati dari pajak yang disetor kepada negara. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi pemerintah dalam menilai apakah tujuan penyelenggaraan pemerintahan sudah terpenuhi secara memadai.

Di satu sisi, berbagai literatur dan temuan praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengukuran kinerja organisasi publik merupakan proses yang rumit dan penuh tantangan. Pengukuran kinerja lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai indikator yang mencerminkan kepuasan publik, yang sifatnya tidak selalu terukur secara kuantitatif. Selain itu, setiap organisasi publik memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda, sehingga penyesuaian diperlukan pada pendekatan pengukuran kinerja. Banyak organisasi publik yang lebih berorientasi pada proses dibandingkan hasil. Hal ini mempersulit pengukuran kinerja karena tidak semua aspek proses dapat diukur secara konkret.

10.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Mengingat peran krusial sektor publik dalam melayani masyarakat, evaluasi kinerja melalui pengukuran menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan penyediaan barang dan jasa publik. Bastian (2001) mengidentifikasi beberapa manfaat penting pengukuran kinerja bagi organisasi sektor publik, baik secara internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Adapun menurut Mardiasmo (2002) manfaat pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik, yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Pengukuran kinerja menjadi instrumen penting bagi instansi pemerintah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Melalui pengukuran ini, layanan publik dapat diukur, dievaluasi, dan dibandingkan dengan instansi sejenis. Penghargaan dan tindakan disiplin dapat diberikan secara terukur, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai contoh, pengukuran kinerja di bidang pendidikan memiliki banyak manfaat. Pertama, meningkatkan akuntabilitas karena pengukuran kinerja membantu sekolah dan dinas pendidikan untuk menunjukkan kepada publik bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran karena pengukuran kinerja dapat membantu sekolah untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, sekolah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga, pengukuran kinerja yang objektif dan transparan dapat memotivasi guru dan staf untuk meningkatkan kinerja mereka. Terakhir, pengukuran kinerja dapat membantu sekolah untuk menggunakan input secara lebih efisien. Dengan mengetahui di mana sumber daya digunakan secara optimal dan di mana terdapat inefisiensi. Oleh karena itu, penggunaan pengukuran kinerja setidaknya memiliki manfaat yakni untuk operasional (untuk memantau kinerja), pemberian insentif (untuk menghargai kinerja yang baik); dan eksplorasi (untuk menyelaraskan kinerja dengan tujuan strategis organisasi).

10.4 Elemen Pengukuran Kinerja

Penetapan indikator kinerja untuk layanan atau program pemerintah didasarkan pada tujuan pengukuran kinerja. Budding *et al.* (2015) membagi indikator tersebut dapat dikategorikan berdasarkan dimensi pengukurannya, yaitu:

1. Subjektif versus objektif: sejauh mana indikator tersebut bebas dari bias?
2. Kuantitatif versus non-kuantitatif: apakah pengukuran dapat dinyatakan dalam angka-angka yang dapat diringkas dan dibandingkan?
3. Diskrit versus skalar: apakah pengukuran dinyatakan dalam bentuk dikotomis (ya/tidak) atau dapatkah diukur dalam skala?
4. Pengukuran aktual versus pengukuran pengganti: jika output aktual tidak dapat diukur (secara efisien), maka pengukuran pengganti dapat digunakan, yang harus berkaitan erat dengan tujuan.
5. Kuantitas versus kualitas: apakah pengukuran menyatakan kualitas output atau kuantitas layanan/produk?

Dalam pengukuran kinerja perlu memperhatikan elemen-elemen kinerja berikut ini:

1. Input

Institusi perlu menetapkan tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan, lalu mengumpulkan input yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Input mencakup sumber daya yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan output (Jones & Pendlebury, 2010). Jumlah input yang digunakan mencerminkan seberapa banyak sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, karyawan, infrastruktur, teknologi (*hardware* atau *software*), dan uang. Pengukuran input biasanya relatif mudah, misalnya jumlah dokter di rumah sakit, guru di sekolah, dan lain sebagainya.

2. Output

Output merupakan apa yang diberikan berupa implementasi oleh institusi tersebut kepada masyarakat (Bandy, 2023). Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Ada yang mudah dihitung, seperti jumlah pengunjung museum dan jumlah pasien yang diperiksa di klinik. Namun ada juga pelayanan publik lainnya tidak memiliki pengguna langsung sehingga

keluarannya harus diukur secara berbeda. Misalnya, layanan penerangan jalan dapat diukur berdasarkan jumlah total lampu jalan yang berfungsi atau total panjang jalan raya yang diterangi.

3. Outcome

Outcome adalah dampak dari aktivitas tertentu, baik terhadap pengguna layanan langsung atau masyarakat pada umumnya (Bandy, 2023). Output sebelumnya berinteraksi dengan lingkungan individu dan kelompok yang menjadi sasarannya sehingga menghasilkan dampak dalam jangka panjang. Outcome memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan output karena mengukur dampak positif terhadap masyarakat, sedangkan output hanya mengukur hasil tanpa mempertimbangkan dampaknya. Di satu sisi, pengukuran outcome lebih rumit dibandingkan output karena beberapa alasan:

- a. Dampak output baru terasa dalam jangka panjang.
- b. Membutuhkan penilaian kualitatif dan kuantitatif.
- c. Dihadapi dengan beberapa permasalahan seperti ambiguitas tujuan, keterukuran output, dan terminologi yang berbeda.

Misalnya, dalam mengukur kualitas pendidikan yang penting bukanlah berapa banyak anak yang pernah mengikuti kelas di sekolah dasar, melainkan berapa banyak anak yang bisa membaca dan menulis setelah mereka lulus. Oleh karena itu, outcome merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas program/kegiatan di sektor publik. Meskipun pengukurannya rumit, outcome memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 10.1. mengilustrasikan contoh pengukuran masukan, output, dan outcome untuk layanan perpustakaan di suatu organisasi sektor publik.

Tabel 10.1. Ilustrasi Input, Ouput dan Outcome pada layanan perpustakaan daerah

Pengukuran Input	• Jumlah staf • Jumlah anggota yang terdaftar • Jumlah buku • Jumlah komputer untuk publik • Total anggaran tahunan • Pembelanjaan tahunan untuk stok buku
Pengukuran Output	• Jumlah pengguna komputer • Persentase pengguna yang puas dengan layanan ini • Jumlah pengunjung perpustakaan
Pengukuran Outcome	• Persentase warga yang puas dengan layanan • Persentase penduduk yang mengakses internet • Persentase penduduk yang melek huruf secara fungsional

Sumber : Bandy (2023)

10.5 Konsep Value for Money

Konsep *Value for Money* memegang peran fundamental dan sering kali digambarkan sebagai inti pengukuran kinerja. Hal ini dikarenakan konsep ini berfokus pada penilaian penggunaan sumber daya publik. Bandy (2023) mendefinisikan nilai uang sebagai sesuatu yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini berarti setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan penuh ketelitian dan transparansi. Secara umum nilai uang di sektor publik dicirikan oleh tiga hal berikut:

1. Ekonomis (meminimalkan biaya input);

Ekonomis membandingkan antara input seharusnya dengan aktual. Ekonomis dalam organisasi sektor publik

bukan hanya tentang penghematan biaya, tetapi juga tentang memaksimalkan nilai yang dihasilkan dari setiap rupiah yang digunakan. Hal ini berarti bahwa organisasi harus meminimalkan pemborosan dan menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang tersedia.

2. Efisiensi (memaksimalkan rasio output yang dihasilkan dari input)

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Suatu organisasi, program ataupun kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

3. Efektivitas (mencapai hasil yang diharapkan)

Efektivitas bagaikan cerminan pencapaian tujuan, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi yang dibuat output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

10.6 Kendala pengukuran kinerja

Beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik antara lain:

Organisasi sektor publik dan swasta memiliki tujuan yang berbeda. Organisasi privat umumnya bertujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan organisasi sektor publik tidak. Kinerja organisasi swasta dapat diukur menggunakan rasio keuangan, namun untuk organisasi sektor publik cukup berbeda karena mereka tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan laba.

Berbeda dengan organisasi swasta yang menghasilkan produk fisik, output organisasi sektor publik umumnya berupa layanan yang bersifat kualitatif, tidak berwujud, dan tidak langsung dirasakan. Sifat abstrak ini membuat pengukuran kinerja organisasi sektor publik menjadi lebih kompleks dan menantang.

Pada pusat biaya diskresioner seperti organisasi sektor publik, hubungan antara input (biaya) dan output tidak selalu langsung terhubung. Hal ini dikarenakan sebagian besar biaya yang dikeluarkan, seperti biaya kebijakan, bersifat tidak terukur dan sulit dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Selain itu, kepuasan publik adalah tujuan utama. Mengingat heterogenitas masyarakat yang dilayani dengan kebutuhan dan harapan yang beragam, mengukur kepuasan mereka menjadi tantangan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandy, G. (2023) *Financial Management and Accounting in the Public Sector: Third Edition, Financial Management and Accounting in the Public Sector: Third Edition*. Routledge.
- Bastian, I. (2001) *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Budding, T., Grossi, G. and Tagesson, T. (2015) *Public Sector Accounting 1st Edition*. Routledge.
- Jones, R. and Pendlebury, M. (2010) *Public Sektor Accounting*. 6th Edition. Hampshire: Rowan Jones and Maurice Pendlebury
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

BIODATA PENULIS



Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA

Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi dengan gelar Akuntan pada Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung dan langsung diterima bekerja di perusahaan swasta di Jakarta sebagai *Junior Accountant Staff* selama 6 bulan. Lalu diterima bekerja di PT. Bank Dagang Negara (Persero) Tahun 1996 sd 1999. Lanjut bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. Kemudian di Oktober Tahun 2014 mengajukan *resign* dari Bank Mandiri.

Tahun 2015 menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang, serta aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional serta menghasilkan dua buku yang sudah ber-ISBN yaitu: Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan Buku Tanya Jawab Soal Akuntansi Keuangan Menengah. Tulisannya juga dimuat di Buku Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik Edisi 2 dengan judul: Isu Kontemporer Akuntansi Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.

Berhasil meraih gelar Magister Manajemen Tahun 2001 dan Tahun 2020 berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang.

Email Penulis: dwi.ekasari.harmadji@gmail.com

BIODATA PENULIS



Safrizal, S.E., M.Ak., CGAA.

Dosen Program Studi Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Negeri Sriwijaya

Safrizal lahir pada 15 Agustus 1996, berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir, Negeri seribu Parit dan sekarang menetap di Pekanbaru, Riau. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 006 Sungai Ara tahun 2009, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kempas, dan SMA Negeri Dharma Pendidikan Kempas. Pada tahun 2015 memulai pendidikan di Perguruan Tinggi Starat 1, Program Studi Akuntansi Universitas Riau dan lulus dengan predikat cumlaude. Tahun 2019 melanjutkan ke jenjang strata 2 Program Magister Akuntansi Universitas Riau dengan predikat cumlaude. Pengalaman sebagai tenaga ahli akuntansi pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Riau, dan juga sebagai tim anggota penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah di Riau. Diawal tahun 2022 mulai terjun sebagai dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta di Pekanbaru, serta telah menyelesaikan Certified Government Accounting Associate (CGAA) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), disamping aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian, hingga saat ini aktif menjadi Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya

BIODATA PENULIS



Wulandari Pryangan, S.E., M.Ak., CTT

Dosen Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan
Politeknik Bina Husada Kendari

Penulis lahir di Mekar Jaya tanggal 17 Februari 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Bina Husada Kendari. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi. Penulis menekuni bidang Menulis.

Riwayat pekerjaan diantaranya menjadi Staff Auditor Yunior di KAP PAYAMTA 2019, Asisten Tenaga Ahli pada Program KOTAKU periode 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara, dan mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di STIE 66 Kendari.

BIODATA PENULIS



Adhi Alfian, SE., MAk., MiM., CertDA.

Dosen Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Penulis adalah dosen tetap pada Departemen Akuntansi FEB Universitas Padjadjaran, dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Penulis mengajar pada berbagai program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Magister. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada program akuntansi tahun 2010 di Unpad, dan melanjutkan pendidikan master pada perguruan tinggi yang sama dan selesai pada tahun 2016 dengan konsentrasi pada bidang Sistem Informasi Akuntansi, serta pendidikan master lainnya di bidang Pengendalian Manajemen pada tahun 2015 dari ESC Troyes, Prancis. Penulis juga memiliki sertifikasi profesional di bidang *data analytics* dari ACCA, Inggris.

Selama masa kerjanya sebagai dosen dan peneliti, Penulis sudah mempublikasikan berbagai karyanya dalam bentuk buku bahan ajar, serta artikel penelitian di jurnal internasional, nasional, dan konferensi internasional di dalam maupun luar negeri.

BIODATA PENULIS

Yusni, S.E., M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Luwuk

Penulis lahir pada Tanggal 9 Maret 1991 di Lalong, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi. Penulis menekuni bidang Menulis Artikel dan Berbagai Karya Ilmiah dapat dilihat pada Google Scholar. Aktif sebagai ketua Tax Center Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2020-sekarang.

BIODATA PENULIS



Yusni, S.E., M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Luwuk

Penulis lahir pada Tanggal 9 Maret 1991 di Lalong, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi. Penulis menekuni bidang Menulis Artikel dan Berbagai Karya Ilmiah dapat dilihat pada Google Scholar. Aktif sebagai ketua Tax Center Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2020-sekarang.

BIODATA PENULIS



Roy Budiharjo, SE., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom

Menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi (SE) untuk S1 dan Magister Akuntansi (M.Ak) untuk S2, saat ini on going menempuh gelar Phd di Universitas Utara Malaysia. Mengawali Karir sebagai Dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta dan di tempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada prodi Akuntansi dan saat ini sebagai dosen di Universitas Telkom Bandung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis prodi S1 Akuntansi. Dosen tersertifikasi pada tahun 2019. Jabatan Fungsional adalah Lektor.

BIODATA PENULIS



Ismawati, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar

Penulis lahir di Sinjai tanggal 07 Januari 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Univesitas Muhammadiyah Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Brawijaya. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS

Sarsiti, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

Penulis lahir di Plupuh, Sragen tanggal 24 Juni 1976.. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi. Penulis menekuni bidang Akuntansi, Keuangan dan Pajak.

BIODATA PENULIS



Rizky Maharani Rustam, S.Ak., M.M., CTT
Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Politeknik Bina Husada Kendari

Penulis lahir di Kendari tanggal 08 Juli 1997. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Bina Husada Kendari. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen di Universitas Halu Oleo.

Penulis memiliki riwayat pekerjaan yang diantaranya menjadi accounting staff di beberapa perusahaan sampai dengan menjadi manajer keuangan pada perusahaan swasta di Sulawesi Tenggara.

BIODATA PENULIS



Dewi Mustika Ratu S.Ak., M.Sc.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Merupakan pengajar aktif di Departemen Akuntansi Universitas Diponegoro. Penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Jenderal Soedirman dan S2 di Universitas Gadjah Mada